

**PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH* TERHADAP
MEKANISME HAK PILIH DISABILITAS
PADA PEMILIHAN WALIKOTA
BANDAR LAMPUNG 2020**

**(Studi Kasus Pada Komisi Pemilihan Umum
Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

FINA ANGGRAINI

NPM: 1621020260

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1442 H / 2021 M
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH* TERHADAP
MEKANISME HAK PILIH DISABILITAS
PADA PEMILIHAN WALIKOTA
BANDAR LAMPUNG 2020

**(Studi Kasus Pada Komisi Pemilihan Umum
Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

FINA ANGGRAINI
NPM: 1621020260

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Fathul Muin, M.H.I

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M

ABSTRAK

Studi ini menganalisa tentang mekanisme hak pilih disabilitas pada pemilihan Walikota Bandar Lampung tahun 2020. Pemilihan Umum ini sendiri merupakan perwujudan nyata dari proses demokrasi dan juga menjadi alat atau media bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya terhadap negara. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses Pemilihan Umum supaya dapat menentukan siapa saja yang mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan dan/atau mengawasi pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut maka partisipasi pemilih menjadi indikator penting dalam kesuksesan penyelenggaraan pemilu tersebut, termasuk pemilih penyandang disabilitas mental juga mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih. Rumusan masalah yang penulis ajukan yakni, Bagaimana Mekanisme Hak Pilih Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung dan Bagaimana Perspektif *Fiqh Siyasah* Dalam Hak Pilih Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta jenis penelitian lapangan (*field research*) yang didukung dengan kepustakaan (*library reseach*) karena penelitian ini membutuhkan data terkait mekanisme penyelenggaraan pemilu oleh KPU Kota Bandar Lampung serta membutuhkan landasan teori terkait teori *siyasah dusturiyyah* untuk melihat hasil dari data yang diperoleh di lapangan. Bila ditelisik dari Mekanisme Hak Pilih Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020 yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di wilayah Kota Bandar Lampung telah melakukan upaya-upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. Upaya-upaya atau mekanisme tersebut dilakukan dalam bentuk pendataan khusus agar hak pilih penyandang disabilitas dapat terpenuhi, memberikan sosialisasi pemilu kepada disabilitas, menyediakan tempat TPS yang sesuai untuk disabilitas, memberikan Surat Suara Khusus, serta memberikan pendampingan terhadap disabilitas dalam memilih. Kemudian dalam pandangan *Fiqh Siyasah* Terhadap Hak Pilih Disabilitas pada pemilihan Walikota Bandar Lampung yakni bahwa dalam *siyasah dusturiyyah* mengajarkan untuk bersikap toleransi

terhadap sesama tanpa membeda-bedakan terutama terhadap penyandang disabilitas dan tidak bersikap diskriminasi terhadap penyandang disabilitas karena setiap manusia mempunyai hak yang sama. Seperti di dalam Q.S. Al-Hujarat ayat 11 menjelaskan bahwa adanya nilai kesetaraan, keadilan dan tidak bersikap diskriminasi terhadap siapapun, begitu juga dengan hak pilih disabilitas mental pada pemilihan Walikota Bandar Lampung, dimana sudah berjalan dengan baik sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemilihan Umum.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fina Anggraini
NPM : 1621020260
Jurusan : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Perspektif *Fiqh Siyasah* Terhadap Mekanisme Hak Pilih Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020 (Studi Kasus Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2021
Penyusun,



Fina Anggraini
NPM. 1621020260



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Sekretariat: Jl. Letkol Hendro Suratmin, Sukarampe, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Nama : Fina Anggraini
NPM : 1621020260
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Program Studi : Syari'ah
Judul Skripsi : Perspektif *Fiqh Siyasah* Terhadap Mekanisme Hak Pilih Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020 (Studi Kasus Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 2021

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.


Fathul Muin, M.H.I.

NIP. 196706041997032004

NIP. 198505102020121007

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Tata Negara


Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Sekretariat: Jl. Letkol Hendro Suratmin, Sukarambe, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **“Perspektif *Fiqh Siyasah* Terhadap Mekanisme Hak Pilih Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)”** disusun oleh : **Fina Anggraini NPM 1621020260** Program Studi : **Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*)**, telah diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: **20 April 2021**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : **Dr. Jayusman, M.Ag.**

Sekretaris : **Muhammad Jayus, M.H.I.**

Penguji I : **Marwin, S.H., M.H.**

Penguji II : **Dr. Siti Mahmudah, S. Ag., M.Ag.**

Penguji III : **Fathul Mu’in, M.H.I.**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari’ah

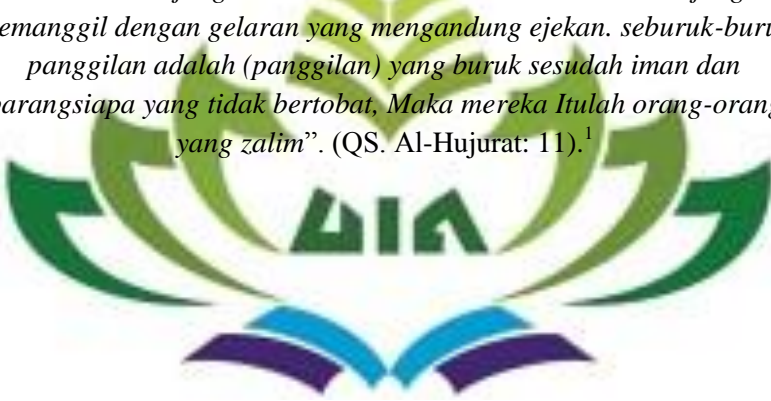
Dr. H. Khairuddin, M.H

NPM 196210221993031002

MOTTO

يَتَّيِبُهُمُ الْدِّينَ ءَامِنُوا لَا يَسْخَرَكُم مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا
نِسَاءً مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا
بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim”. (QS. Al-Hujurat: 11).¹



¹ Q.S. Al-Hujurat : 11

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas Hidayah-Nya karya ilmiah skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku yang tercinta Ayah Muhammad Kosim dan Ibu Yulita Sari yang senantiasa selalu mendo'akan dalam setiap waktunya selalu memberikan semangat, nasehat bimbingan, perhatian serta dukungan. Semoga kelak anakmu ini dapat menjadi anak yang membanggakan untuk kalian berdua dan semoga Allah memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat.
2. Keluarga yang ku sayangi Adik ku Vira Agustina, Virda Septiani, Virdi Aziz Pratama yang selalu memberikan semangat dan dukungan bagi keberhasilan studiku.
3. Almamater kebanggaan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan dikampus ini kelak menjadikan ku manusia yang bermanfaat serta berkah dan di ridhoi Allah SWT. Aamiin



RIWAYAT HIDUP

Fina Anggraini, dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 13 Mei 1998. Anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan bapak Muhammad Kosim dan ibu Yulita Sari.

Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 1 Beringin Raya dan selesai pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Budaya dan selesai pada tahun 2013, Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Bandar Lampung selesai pada tahun 2016 dan mengikuti pendidikan tingkat Perguruan Tinggi Negeri Jurusan Hukum Tatanegara pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2016/2017.



Bandar Lampung, 23 Februari 2021
Yang Membuat,

Fina Anggraini
NPM. 1621020260

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan judul **“Perspektif *Fiqh Siyasah* Terhadap Mekanisme Hak Pilih Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020 (Studi Kasus Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)”**. Karya ilmiah ini disusun guna melengkapi serta memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Tatanegara di UIN Raden Intan Lampung.

Shalawat teriring salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita yakni *Al Uswatun Hasanah* Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat dan ummatnya yang *Insyallah* selalu melanjutkan dakwah beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program (S1) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana (S.H). Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak sekali menerima bantuan dari semua pihak, oleh karena itu melalui tulisan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. KH. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing dan mengoreksi penulis hingga skripsi ini selesai.
4. Bapak Fathul Muin, M.H.I. selaku Pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Prodi Hukum Tatanegara Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta agama kepada saya selama menempuh perkuliahan di kampus.

7. Dua orang yang selalu mendoakan disetiap waktunya untuk keberhasilan dan kesuksesan saya dalam menyelesaikan skripsi ini Ayah dan Ibu tercinta.
8. Petugas perpustakaan Fakultas Syari'ah dan perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesainya skripsi ini.
9. Para sahabat seperjuanganku Annisa Riska Anggraini S.H, Helda Amelia Astuti,S.H, Merlin Tiara Putri, S.Pd, Permata Sari,S.H Uspan Hadiansyah,S.H, Ade Trisna Setiawan, Citra Ratika Sari.
10. Para teman seperjuanganku Siyasah E Angkatan 2016.
11. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang ku kenal semasa hidupku. *Jazakumullah*

Semoga amal ibadah dan kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapatkan imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. Saya sadar dan mengakui bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, karena disebabkan keterbatasan kemampuan ilmu yang dikuasai, untuk itu kritik dan sarannya yang dapat menyempurnakan karya ilmiah ini. Mudah-mudahan hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. *Aamiin ya Robbal 'alamin.*

Bandar lampung,2021

Penulis,

Fina Anggraini

NPM. 1621020260

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu	8
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i>	19
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	19
2. Objek Kajian <i>Fiqh Siyasah</i>	20
3. Pengertian <i>Siyasah Dusturiyah</i>	22
B. Pemilihan Umum.....	23
1. Sejarah Pemilu dan Pilkada di Indonesia	23
2. Konsep Dasar Pemilihan Umum.....	26

3. Tujuan Pemilihan Umum.....	28
4. Asas-Asas Pemilihan Umum	31
5. Ciri Pemilihan Umum.....	33
C. Tata Cara Pemilu di Indonesia.....	35
D. Hak Pilih dan Permasalahannya	38
1. Hak Pilih	38
2. Permasalahan dalam Hak Pilih	40
E. Hak dan Kewajiban Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu	48
F. Disabilitas Dalam Islam.....	54
G. Demokrasi Dalam Islam	60
1. Pengertian Demokrasi	60
2. Unsur-unsur Demokrasi.....	63
3. Dasar-dasar Demokrasi	63
4. Demokrasi Dalam Pandangan Islam	65

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung	75
B. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung	88
C. Daftar Pemilih Penyandang Disabilitas	95
D. Alasan dibolehkannya Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilu	97

BAB IV ANALISIS HAK PILIH BAGI DISABILITAS MENTAL DALAM PEMILU

A. Mekanisme Hak Pilih Disabilitas Mental Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020	101
B. Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Hak Pilih Disabilitas Mental Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020	105

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	109
B. Rekomendasi	110

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Informan Penelitian	13
Tabel1.4 Daftar Pemilih Disabilitas di Kota Bandar Lampung ..	95



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.....	86
Gambar 1.2. Komposisi Pegawai Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung	87
Gambar 1.3 Pendidikan pegawai Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung	87



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Foto Dokumentasi

Lampiran 2 : Surat Rekomendasi Penelitian

Lampiran 3 : Pedoman Wawancara

Lampiran 4 : Surat Keterangan KPU

Lampiran 5 : Blangko Konsultasi

Lampiran 6 : Surat Turnitin



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul ini dilakukan untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam memahami maksud dari judul skripsi, sehingga perlu untuk menjelaskan uraian istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini: **Perspektif *Fiqh Siyasah* Terhadap Mekanisme Hak Pilih Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020**, berikut uraian istilah-istilah tersebut sebagai berikut :

1. Perspektif adalah konteks sistem dan persepsi visual adalah cara bagaimana objek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat spasial, atau dimensinya dan posisi mata relatif terhadap objek.¹
2. *Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang membahas tentang pengaturan urusan-urusan Negara Islam dalam system dan Undang-Undang yang sejalan dengan dasar-dasar Islam.²
3. Mekanisme adalah tata cara menjalankan sesuatu atau cara kerja suatu program.³
4. Hak Pilih adalah (kata benda) milik kepunyaan, kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), semua warga negara yang telah berusia 18 tahun ke atas mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.⁴
5. Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara

¹ Subekti dan Tjirosoedibjo, "Conditio Sine Causa", *Kamus Hukum*, (Jakarta:

² Masykuri Abdillah, "Epistimologi Fikih Siyasah". *Jurnal Ahkam*, Vol. 12, No. 1 (2012), 1.

³ Dessy anwar, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amelia, 2005), 336.

⁴ Pengertian hak pilih (On-line) tersedia di : <https://kbbi.kata.web.id/?s=hak>, diunduh pada tanggal 10 Mei 2020.

penyandang disabilitas dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁵

6. Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020 adalah pemilihan umum lokal yang akan diselenggarakan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia. Pilkada Bandar Lampung ini diadakan dalam rangka memilih Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung periode 2021-2024.⁶

Berdasarkan dari beberapa Penjelasan diatas, penulis menegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul dari penelitian ini yaitu merupakan suatu pembahasan atau kajian yang terkait dengan bagaimana Perspektif *Fiqh Siyasa* Terhadap Mekanisme Hak Pilih Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020.

B. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki dan melekat pada diri setiap manusia sepanjang hidupnya, sejatinya adalah hak pribadi dan kodrat yang diberikan oleh Sang Pencipta. Hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali ini kemudian menuntut kepada setiap individu untuk melaksanakan atau mendapatkan hak tersebut tanpa membentur hak orang lain. Sebagai hak dasar, hak asasi manusia memiliki lingkup yang sangat luas. Garis besar hak-hak yang terangkum dalam hak asasi manusia diantaranya adalah hak-hak asasi politik atau dikenal dengan *political right* atau hak politik.

Dinamika politik di Indonesia pada penghujung tahun 2018 kembali hangat disebabkan oleh terbitnya Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas mental berhak memperoleh hak pilih sehingga dapat didata sebagai pemilih. Hal tersebut rupanya

⁵Jati Rinakri Atmaja, *Pendidikan dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 7.

⁶ Maria Desti Rita, "Peranan Kpu Dalam Sosialisasi Pemilukada Kepada Penyandang Disabilitas Di Kota Bandar Lampung", *Jurnal Kultur Demokrasi*, Vol. 5, No. 1, (2006), 3.

menimbulkan pendapat beragam dimana akhirnya pemerintah mengakomodir hak penyandang disabilitas mental namun di sisi lain, hal ini memunculkan kekhawatiran bagi penyandang disabilitas mental apakah dapat menggunakan hak pilihnya secara baik dan benar atau tidak. Di Indonesia, para pendiri bangsa melihat demokrasi secara utuh, sebagai suatu sistem yang memiliki nilai dan prinsip dasar di samping mekanisme instrumental. Hal itu dapat dilihat dari naskah pembukaan UUD 1945 yang pada alinea pertama telah menegaskan keyakinan kesetaraan melalui kalimat “Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa”. Pengakuan tersebut tentu saja meliputi pengakuan atas kemerdekaan dan kebebasan tiap insan manusia. Bahkan pada alinea ketiga juga ditegaskan bahwa rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya “Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas”.⁷

Dianutnya sistem demokrasi bagi bangsa Indonesia dituangkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia terbentuk dalam “Susunan Negara Republik Indonesia yang Berkedaulatan Rakyat” dalam suatu “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”.⁸ Pernyataan tersebut sekaligus merupakan penegasan bahwa demokrasi dianut bersama-sama dengan prinsip Negara Konstitusional. Pilihan sistem demokrasi konstitusional dimaksudkan untuk mencapai tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.⁹

Pada umumnya Negara di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dengan bentuk pemerintahan republik dan bentuk Negara berserta konstitusi yaitu kesatuan dan UUD

⁷ Jenedjri M. Gaffar, “*Demokrasi Konstitusional (Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945)*”, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), 37.

⁸ Hartuti Purnaweni, “Demokrasi Indonesia dari Masa ke Masa”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3, No.2, (2004), 9.

⁹ *Ibid.*, 38.

1945. Dalam pemilihan umum presiden pada saat 5 tahun sekali dengan sistem demokrasi langsung yang dipilih oleh rakyat Indonesia. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu prinsip “kedaulatan rakyat”, sebagaimana dijelaskan 77 dalam syarah No.2 Bab I. Melalui pemilu rakyat ikut menentukan siapa yang terbaik bagi mereka untuk menjadi pemimpin (Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Desa) atau wakil dalam lembaga legislative (DPR-RI/DPR-D/DPD) yang menurut keyakinan mereka minimal memiliki dua kualifikasi: kecakapan (fathanah/capability) menjalankan tugasnya, dan sifat amanah (*credibility*) dalam mengemban mandat rakyat, benar-benar untuk rakyat yang memberikan mandat di pundaknya.¹⁰

Hak Politik Warga Negara adalah bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh warga negara dimana asas kenegaraannya menganut asas demokrasi. Yang mencakup hak politik merupakan bagian dari hak ikut serta dalam pemerintahan. Hak ikut serta dalam pemerintahan dapat dikatakan sebagai bagian yang sangat penting dari sebuah demokrasi. Hak ini bahkan dapat dikatakan sebagai pengejawantahan dari demokrasi, sehingga jika hak ini tidak ada dalam suatu negara, maka Negara tersebut tidak seharusnya dikatakan sebagai negara demokratis. Negara-negara yang menganut demokrasi, pada umumnya mengakomodir hak politik warganegaranya dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung.¹¹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 memberikan definisi bahwa penyandang disabilitas setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan

¹⁰ Masdar Farid Mas’udi, *Syarah Konstitusi Uud 1945 Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011), 103.

¹¹ Ahmad Zazili, “Pengakuan Negara Terhadap Hak-Hak Politik (Right To Vote) Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 1, (2012), 15.

untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹²

Dalam Undang-Undang Hak Manusia juga menjamin bahwa setiap warga Negara Indonesia ini tertuang dalam pasal 28 D sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
2. Setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
3. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya.

Gangguan jiwa dapat mengenai setiap orang, tanpa mengenal umur, ras, agama, maupun status sosial-ekonomi. Gangguan jiwa bukan disebabkan oleh kelemahan pribadi. Di masyarakat banyak beredar kepercayaan atau mitos yang salah mengenai gangguan jiwa, ada yang percaya bahwa gangguan jiwa disebabkan oleh gangguan roh jahat, ada yang menuduh bahwa itu akibat guna-guna, karena kutukan atau hukuman atas dosanya. Kepercayaan yang salah ini hanya akan merugikan penderita dan keluarganya karena pengidap gangguan jiwa tidak mendapat pengobatan secara cepat dan tepat.¹³

Orang gangguan jiwa dalam hukum Islam disebutkan bahwa tidak akan terbebani oleh Hukum kecuali dengan 3 (tiga) perkara yaitu, orang gila, orang yang tidur dan anak-anak sampai dia baligh. Hal ini sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَخْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

“Tiga orang yang tidak dianggap bertanggung jawab atas pertanggungjawab atas perbuatannya, yaitu orang gila hingga ia kembali waras, orang yang tidur hingga ia tersadar (bangun)

¹² Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia (Perspektif Internasional, Regional, Dan Nasional)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 257.

¹³ Andriani Putri, *Klasifikasi Gangguan Jiwa*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2005), 89.

dari tidurnya, dan anak-anak hingga ia bermimpi (baligh)”. (H.R Bukhari, Abu Daud, AlTirmidzi, Al-Nasai, dan Ibnu Majah).¹⁴

Orang dalam gangguan jiwa atau mental tidak diwajibkan melaksanakan ibadah seperti Thaharah, Sholat, Puasa haji dan ibadah lainnya. Melakukan suatu muamalah tidak dianggap sah karena ucapannya secara umum tidak dianggap, orang gila melakukan perbuatan pidana tidak dapat dikenai hukuman juga karena akal dan jiwanya yang membatasinya sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Kecuali zakat, karena jika dia mempunyai harta, yang dibayarkan oleh walinya, sebagaimana diminta juga untuk membayar denda, ganti rugi, jika ia merusak sesuatu; karena hal ini masuk dalam kategori kewajiban *wadh’i* (kewajiban yang dikaitkan dengan pihak lain) bukan kewajiban *taklif* (kewajiban yang berkaitan dengan pelaku).¹⁵

Oleh karena itu, peneliti memandang penting untuk mengkaji dan mendalaminya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul Perspektif *Fiqh Siyasah* Terhadap Mekanisme Hak Pilih Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

- a. Mekanisme Hak Pilih Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020
- b. Perspektif *Fiqh Siyasah* Dalam Hak Pilih Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Dillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 601.

¹⁵ Syamsarina, “Eksistensi Hukum Wadh’i Dalam Syari’at”, *Jurnal Al-Qishthu*, Vol. 14, No. 1 (2016), 21.

variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Mekanisme Hak Pilih Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penerlitan ini adalah:

1. Bagaimana Mekanisme Hak Pilih Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020?
2. Bagaimana Perspektif *Fiqh Siyasah* Dalam Hak Pilih Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Mekanisme Hak Pilih Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020
2. Untuk mengetahui Perspektif *Fiqh Siyasah* Dalam Hak Pilih Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian dapat dibedakan menjadi 2 hal yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah kekayaan khasanah ilmu pengetahuan dan bacaan, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi yang membaca terkait dengan Perspektif *Fiqh Siyasah* Terhadap Mekanisme Hak Pilih Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020.
 - b. Dapat dijadikan referensi dalam memperoleh informasi tentang bagaimana Perspektif *Fiqh Siyasah* Terhadap Mekanisme Hak Pilih Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020.

- c. Dapat mengembangkan kemampuan bekarya dengan daya nalar dan acuan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki supaya dapat menjawab permasalahan yang timbul secara objektif melalui metode ilmiah, khususnya permasalahan yang berkaitan tentang Hak Pilih Disabilitas pada pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020.
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurnaan bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai Perspektif *Fiqh Siyasah* Terhadap Mekanisme Hak Pilih Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020.
 - b. Untuk memenuhi tugas akademik bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas *Syari'ah*.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

1. Penelitian yang pertama yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Amri Purba (2019) dengan judul “Hak Memilih Bagi Orang Yang Terganggu Jiwa/ Ingatan Dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Analisis *Fiqh Siyasah*)”¹⁶. Hasil penelitian ini adalah menunjukan bahwa :
 - a. Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia hak memilih bagi orang dengan gangguan jiwa/ingatan mengalami perbedaan mendasar hal ini dapat ditinjau melalui Undang-Undang No. 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 135/PUU/-XIII/2015. Di dalam Undang-Undang

¹⁶ Wahyu Amri Purba, “Hak Memilih Bagi Orang Yang Terganggu Jiwa/ Ingatan Dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Analisis *Fiqh Siyasah*)”, (Skripsi, Program Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan 2019), 103.

No. 07 tahun 2017 hak memilih bagi orang yang terganggu jiwa/ ingatan tidak diberi batasan dalam undang-undang sebab undang-undang mengalami kekosongan hukum sehingga berakibat pada ketidakpastian hukum, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 135/PUU/-XIII/2015 orang dengan gangguan jiwa/ingatan permanen tidak terdaftar sebagai pemilih dan tidak dapat memilih di dalam pemilihan umum, dan secara teknis hal itu di buktikan dengan surat keterangan ahli kesehatan.

- b. Maka berdasarkan Undang-Undang No. 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilihan di tahun 2019 merupakan pemilihan yang cacat hukum sebab undangundang tidak memberi batasan bagi orang dengan gangguan jiwa/ingatan dalam hal memilih, sehingga mengakibatkan pemilihan di tahun 2019 memberikan peluang orang dengan gangguan jiwa/ingatan untuk memilih.
 - c. Berdasarkan Fiqih Siyasah orang dengan gangguan jiwa/ingatan tidak dapat memilih pemimpin disebabkan kurangnya/ketidakmampuan akal dalam mengetahui pemimpin yang ia pilih, sehingga ia tak berhak untuk memilih pemimpin. Hal ini didasari bahwa orang dengan gangguan jiwa/ingatan tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan Allah SWT. Hal tersebut sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh al Bukhori dan abu Daud.
2. Penelitian yang kedua yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Anifatul Kiftiyah (2019) dengan judul “Analisis *Fikih Al-Siyāsah Al-Dustūriyyah* Terhadap Golput (Golongan Putih) Dalam Pelaksanaan

Pemilihan Umum Yang Demokratis”.¹⁷ Hasil penelitian ini adalah menunjukan bahwa:

- a. Pemilu merupakan implementasi demokrasi, dalam pelaksanaan Pemilu kedaulatan rakyat sangat di junjung tinggi dan hak-hak rakyat harus dilindungi. Sebagai suatu hak, tindakan Golput tidak dapat dipidana akan tetapi mengajak seseorang untuk Golput dapat dikenai tindakan pidana sesuai dengan UU no 7 tahun 2017 pasal 510 dan pasal 515. Dalam prakteknya, meskipun dalam undang-undang telah diatur larangan kampanye Golput, akan tetapi kampanye Golput atau ajakan Golput masih terjadi pada pelaksanaan Pemilu. Golput dalam Pemilu 2019 mengalami penurunan meskipun kampanye Golput sangat gencar khususnya di media sosial. Dalam mengatasi meningkatnya angka Golput, lembaga penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) telah melibatkan masyarakat secara langsung dalam penyampaian informasi, pelaksanaan dan pengawasan Pemilu. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan Pemilu dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pelaksanaan Pemilu. Dengan demikian akan meumbuhkan kesadaran masarakat dan dapat mencegah meningkatnya angka Golput dalam pelaksanaan Pemilu.
3. Hasil penelitian Aidil Saputra, dan Hamdani M, Syam yang berjudul "Strategi Komunikasi KIP Banda Aceh pada Pilkada 2017 dalam Mensosialisasikan Anti Golongan Putih (Golput) Melalui Media Massa". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi komunikasi yang dijalankan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Banda Aceh pada Pilkada serentak 2017 dalam meminimalisir atau menekan suara

¹⁷ Anifatul Kiftiyah, “Analisis Fikih Al-Siyāsah Al-Dustūriyyah Terhadap Golput (Golongan Putih) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Yang Demokratis”, (Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Sunan Ampel, Surabaya 2019), 111.

golput melalui media massa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada empat strategi yang disampaikan KIP Banda Aceh dalam Pilkada 2017 terhadap kesadaran masyarakat pemilih, yakni adalah mengenal khalayak, kemudian penyusunan pesan, menetapkan metode, dan penggunaan media. Saran dari penelitian ini adalah KIP Banda Aceh harus lebih gencar dalam mensosialisasikan pilkada mendatang agar sesuai dengan target pemilih yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, yaitu 75%.

Berdasarkan dari kajian penelitian terdahulu, terdapat perbedaan dengan apa yang diteliti oleh penulis. Adapun pembeda antara penelitian yang dilakukan peneliti dan penelitian terdahulu adalah bahwa peneliti berfokus kepada Perspektif *Fiqh Siyasa* Terhadap Mekanisme Hak Pilih Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020 Studi Pada (Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung).

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.¹⁸

Kemudian dijelaskan kembali oleh Soerjono Soekanto bahwa metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak dan harus ada di dalam suatu penelitian dalam pengembangan suatu ilmu pengetahuan.¹⁹ Sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini (*research*) menggunakan penelitian kualitatif, karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek

¹⁸Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Methodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 1.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 7.

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Maka dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Sesuai dengan judul yang di angkat maka jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) dan pustaka (*library research*). Menurut Kartini Kartono “Penelitian Lapangan (*Field research*) merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat, kemudian penelitian pustaka (*library research*) yaitu metode yang digunakan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat dalam kepastakaan.”²⁰

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yakni menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami dan di simpulkan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menerangkan dan menggambarkan atau mendiskripsikan tentang hak pilih bagi orang dengan gangguan jiwa (Disabilitas mental) dari data yang diperoleh dari berbagai sumber dan dianalisa dengan fiqh siyasah. Sifat penelitian berupa pengolahan data kualitatif yang dimana peneliti akan mewawancarai, mengobservasi, mendokumentasi yang berguna untuk mencari informasi dan menggali lebih dalam terhadap kasus tersebut.

²⁰Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), 14.

3. Partisipan dan Lokasi Penelitian

1) Partisipan

Partisipan yang dimaksud adalah sejumlah informan yang mendukung dalam penelitian ini. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data *purposive sampling* yaitu memilih informan yang dianggap layak dan representatif dalam memberikan informasi dan fakta.

- a) Bagian dari KPU Kota Bandar Lampung.
- b) Terlibat dalam penyelenggaraan pemilu/kada/pilwakot tahun 2020.
- c) Mengetahui banyak informasi terkait pemilu/kada/pilwakot tahun 2020.

Berdasarkan kriteria tersebut penulis melihat beberapa pihak yang relevan dan dapat dijadikan informan serta memiliki kesesuaian dengan kriteria-kriteria penetapan sampel penelitian sebagaimana dijabarkan di atas, adapun informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Informan Penelitian

No	Nama	Umur	Jabatan
1.	Ika Kartika, S.Pdi	38 Tahun	Kasubbag Program dan Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung
2.	Tuyono, S.Sos	42 Tahun	Kasubbag Umum, & Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung

3	Hasbiyah, S.I.Kom.,M.M.	40 Tahun	Staff Pelaksana Keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung
---	----------------------------	----------	---

2) Lokasi Penelitian

KPU Kota Bandar Lampung berlokasi di Jl. Pulau Sebesi No.90, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung, pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan data maupun informasi bisa langsung didapat dari lokasi yang telah ditentukan oleh penulis.

2. Sumber data

Dalam penelitian untuk menghasilkan suatu data yang akurat untuk suatu penulisan karya ilmiah, maka data tersebut didapatkan dengan tiga sumber data, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Untuk memperjelas sumber data yang digunakan maka akan diuraikan sebagaimana berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data pokok yang digunakan dalam proses penelitian. Dimana bahan hukum tersebut memiliki sifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas. Diantaranya yaitu penelitian studi pustaka yang menjelaskan isi terkait : Perspektif *Fiqh Siyasa* Terhadap Mekanisme Hak Pilih Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang berisi suatu informasi serta penjelasan pendukung yang mengiringi data primer. Seperti buku – buku hukum, termasuk skripsi,

tesis, disertai jurnal – jurnal hukum, termasuk juga bahan sumber dari berita atau artikel online.²¹

c. Sumber Data Tersier

Data tersier yaitu data yang berisikan informasi tentang penjelasan data baik berupa data primer maupun data sekunder. Dalam hal ini data tersebut bisa berupa kamus – kamus, ensiklopedia baik media cetak atau media online.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena yang diselidiki yang terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung,²² dan yang menjadi bahan observasi adalah Ika Kartika, S.Pd selaku Kasubbag Program Dan Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung, Tuyono, S.Sos selaku Kasubbag Umum Dan Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung dan Hasbiyah, S.I.Kom., M.M selaku Staff Pelaksana Keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung.

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Disini peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti: Ketua KPU Kota Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memperoleh data dari dokumen yang berkaitan dengan pokok penelitian,

²¹Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 141.

²²Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1998), 135.

misalnya dari buku, dokumen/arsipdan lain-lain. Melalui cara ini, peneliti mencari data seperti statistik pemilih disabilitas mental.

4. Metode Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam pengolahan data tersebut menggunakan metode pendekatan *diskriptif analistik*. Analisis datamenyajikan pakta secara sestematis guna tercapainya tujuan yang dimaksud penulis menggunakan metode – metode yang saling melengkapi yaitu dengan *Content – Analysis*, yakni metode yang digunakan dengan cara melihat struktur isi analisis terhadap perbandingan dua variabel terkait dengan analisis Fiqh Siyasah yang terkait dengan hak pilih orang dengan Disabilitas mental.

Dari data yang diperoleh seluruhnya kemudian bahan dalam penelitian ini diolah dan dianalisa dengan menggunakan suatu cara pengolahan data yang diantaranya sebagai berikut²³:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Merupakan cara yang dilakukan oleh penulis untuk mengoreksi terkait dengan kelengkapan data yang sudah dikumpulkan, kevaliditasan data yang telah diperoleh tersebut dan relevansinya dari data-data yang diperoleh berdasarkan pada studi literatur yang berkaitan terhadap suatu penelitian.

b. Rekonstruksi Data (*reconstucting*)

Yaitu menyusun ulang data secara terartur, beruntun, logis, sehingga mudah untuk dipahami dan diintrepresiasi.

c. Sistematisasi Data (*sistematizing*)

Merupakan cara yang ditempuh oleh penulis dalam menempatkan data, yang menurut data atau kerangka

²³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), 135.

sistematika bahasan yang berdasarkan pada kronologi masalah yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut.

5. Analisa Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang dibahas akan nampak manfaatnya, terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai akhir penelitian. Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesa.

Penulis akan menganalisisnya secara kualitatif bentuk analisis ini dilakukan dengan penjelasan-penjelasan. Metode yang digunakan untuk menganalisis data di antaranya sebagai berikut :

- a. Metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari suatu masalah berdasarkan pada hal-hal atau kejadian-kejadian yang umum kepada suatu kesimpulan yang khusus.²⁴ Metode ini digunakan untuk mengungkap data yang diperoleh dari jalan pemikiran yang umum kepada pemikiran yang khusus, yang kemudian dapat memberikan jalan pembuktian menuju suatu kebenaran yang ilmiah.
- b. Metode induktif yaitu berfikir dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa yang kongkrit, kemudian ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan metode ini dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalisa, sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan.²⁵

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dalam penelitian ini penulis menguraikan secara garis besar dalam beberapa bab yang

²⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1987), 80.

²⁵ Deddy Mulyana, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Permata Rosadakarya, 2010), 146.

bertujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran tentang materi yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan skripsi dengan judul Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Mekanisme Hak Pilih Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020. Kemudian dalam bab ini juga memuat penegasan judul, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

2. Bab II Landasan Teori

Bab ini merupakan landasan teori yang berisi pengertian pemilihan umum, tata cara pemilu di Indonesia, hak pilih dan permasalahannya, hak dan kewajiban penyandang disabilitas dalam pemilu, serta demokrasi dalam Islam dan penjelasan yang berkaitan dengan skripsi.

3. Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan pendeskripsian objek penelitian serta penyajian fakta dan data penelitian.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang beberapa kajian yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yang menjelaskan tentang Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Mekanisme Hak Pilih Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020.

5. Bab V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi yang mengarah kepada penyempurnaan penulisan tentang Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Mekanisme Hak Pilih Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *fiqh siyasah*

Istilah *fiqh siyasah* merupakan kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, *fiqh* berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci. Sementara mengenai asal kata *siyasah* terdapat dua pendapat.²⁶

Definisi *fiqh* dan *siyasah*, baik secara etimologis maupun terminologis, perlu juga kiranya dikemukakan definisi *fiqh siyasah*. Penting dicatat, dikalangan teoritis politik Islam, ilmu *fiqh siyasah* itu sering juga disinonimkan dengan ilmu *siyasah syar'iyah*.²⁷ Sebagaimana dijelaskan *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghadirkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

Fiqh siyasah dibagi menjadi dua jenis yaitu: pertama, *siyasah syar'iyah* yaitu etika agama. Kedua, *siyasah wadh'iyah* yaitu hukum tatanegara yang dihasilkan oleh

²⁶ *Ibid*, h. 12.

²⁷ Abdurrahman, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islamin* (Mesir: Mathba'ah Dar Al Ta'lif, 1993), 13-14.

produk pemikiran manusia semata yang dalam proses penyusunannya terdapat pada tujuannya. *Siyasah syar'iyah* bertujuan mengantarkan rakyat menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sementara *siyasah wadh'iyah* hanya bertujuan mengantarkan rakyat untuk menggapai kebahagiaan duniawi saja.

2. Objek Kajian *Fiqh Siyasah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*, diantaranya ada yang menentang lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Menurut al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup:

- a. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*).
- b. Ekonomi dan militer (*siyasah maliyyah*).
- c. Peradilan (*siyasah qadha'iyah*).
- d. Hukum perang (*siyasah harbiyyah*).
- e. Administrasi negara (*siyasah idariyyah*).²⁸

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional.²⁹ Sementara Abdul wahhab khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.³⁰

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang yaitu:

²⁸ Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyah, M.Yusuf Musa, *Politik dan Negara dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka LSI, 1991), 4.

²⁹ Muhammad Amin, *Ijihad Ibn Taimiyah Dalam Bidang Fiqh Islam* Jilid IX (Jakarta: Inis, 1991), 15.

³⁰ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 9.

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-Undangan).
- b. *Siyasah Tasyi'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum).
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan).
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Moneter/Ekonomi).
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara).
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional).
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan).
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).³¹

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama politik perundang-undangan (*alsiyasah al-dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyi'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh lembaga birokrasi atau eksekutif. Kedua, politik luar negeri (*al-siyasah al-kharijah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga non-muslim (*al-siyasah al-duali al-'am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Ketiga, politik keuangan dan moneter (*al-siyasah al-maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam *siyasah maliyah* ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan. Dengan *siyasah syar'iyah*, pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan disegala bidang yang mengandung kemaslahatan umat, baik itu di bidang politik, ekonomi, hukum dan perundang-undangan.

³¹ T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Siyasah Syari'iyah* (Yogyakarta : Maddah, 2000), 8.

3. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.³²

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³³

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.³⁴

a. Ruang Lingkup dan Kajian *Siyasah Dusturiyah*

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun

³² Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 177.

³³ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

³⁴ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin....* 177-178.

demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:³⁵

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- 4) Persoalan *bai'at*
- 5) Persoalan *waliyul ahdi*
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- 8) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: *pertama*, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil *ijtihad* ulama, meskipun tidak seluruhnya.³⁶

B. Pemilihan Umum

1. Sejarah Pemilu dan Pilkada di Indonesia

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

³⁵ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi*.... 48.

³⁶ *Ibid.*

Indonesia.³⁷ Pemilu adalah pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan tertentu. Untuk itu pemilihan umum sangat penting karena dalam pemilu terjadi pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pilkada pada dasarnya sama dengan pilpres. Keduanya diselenggarakan untuk memilih pemimpin secara langsung. Pilkada dilakukan untuk memilih kepala daerah. Kepala daerah tersebut antara lain gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota. Pilkada dilakukan pada lingkup tertentu.³⁸ Pilkada dilakukan pada lingkup tertentu. Adapun sejarah pemilu di Indonesia sebagai berikut :

a. Pemilu 1955 (Masa Parlemen)

Pemilu di Indonesia pertama kali pada tahun 1955, pada tahun ini pemilu pertama yang diselenggarakan bangsa indonesia yang baru berusia 10 tahun, pemilu 1955 dilaksanakan pada masa demokrasi parlementer pada kabinet Burhanuddin Harahap, pemungutan suara dilakukan 2 kali yaitu untuk memilih anggota DPR pada tanggal 29 september 1955 dan untuk memilih anggota konstituante pada tanggal 15 desember 1955.³⁹

b. Pemilu kedua pada tahun 1971-1997 (Masa Orde Baru)

1) Pemilu 1971

Merupakan pemilu yang diselenggarakan bangsa indonesia, pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 5 juli 1971 ini untuk memilih anggota DPR.

³⁷ Tim Redaksi BIP, Undang-Undang Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang NO 7 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018), 3.

³⁸ Setiati widihastuti dan Fajar Rahayuningsih, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: PT Pustaka Insan Mandiri, 2008), 34.

³⁹ M masan dan Rachmat, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2011), 32.

2) Pemilu 1977

Pemilu kedua pada masa orde baru yang diselenggarakan pada tanggal 2 mei 1977.

3) Pemilu 1982

Pemilu ini merupakan pemilu ketiga pada masa orde baru, pemilu ini diselenggarakan pada tanggal 4 mei 1982\

4) Pemilu 1987

Pemilu ini merupakan pemilu keempat yang diselenggarakan pada tanggal 23 april 1987. Pemilu 1992 pada tanggal 9 juni 1992. Pemilu 1997 pada tanggal 29 mei 1997.

Pemilu pada masa orde baru ini sistemnya sama yaitu menganut sistem perwakilan berimbang (porposional), dan peserta pemilu yaitu: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia.

c. Pemilu 1999-2009 (Masa Orde Reformasi)

Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama pada masa reformasi, pemungutan dilaksanakan pada tanggal 7 jumi 1999 secara serentak di seluruh indonesia. Peserta pemilu pada tahun ini diikuti 48 partai politik. Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama yang memungkinkan rakyat memilih langsung yang diselenggarakan pada tanggal 5 April 2004, dan pemilu pada tahun 2009 merupakan pemilu yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 9 april 2009. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004 secara langsung telah mengilhami dilaksanakannya pemilihan kepala daerah dan wakilnya (pilkada) secara langsung, oleh karena itulah sejak tahun 2005 telah diselenggarakan Pilkada secara langsung baik ditingkat Provinsi maupun kabupaten/kota. Penyelenggaraan ini diatur dalam UU No 32 tahun 2004.

2. Konsep Dasar Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan salah satu proses untuk memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk proses seleksi terhadap lahirnya wakil rakyat dan pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi, karena pemilihan umum merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan rakyat, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan.⁴⁰ Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh UUD 1945 Kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat begitu juga dengan pemilihan kepala daerah.

Hampir tidak ada sistem pemerintahan yang bersedia dicap tidak demokratis, maka hampir tidak ada sistem pemerintahan yang ideal menjalankan pemilu (hanya sejumlah kecil yang tidak melaksanakan pemilu seperti Brunei Darussalam dan Negara–Negara timur tengah). Pemilu merupakan sistem penjaringan pejabat publik yang banyak digunakan oleh Negara-negara di dunia dengan sistem pemerintahan demokrasi. Tidak dapat dibantah bahwa demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan.⁴¹

Bagi sejumlah Negara yang mengklaim atau menerapkan diri sebagai Negara demokrasi. Artinya, pelaksanaan dan hasil pemilu merupakan refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi, di samping perlu adanya kebebasan berpendapat dan berserikat yang dianggap cerminan pendapat warga Negara.

⁴⁰ Titi Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), 329.

⁴¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 237.

Alasannya, pemilu memang dianggap akan melahirkan suatu representatif aspirasi rakyat yang tentu saja berhubungan erat dengan legitimasi bagi pemerintah. Melalui pemilu, demokrasi sebagai sistem yang menjamin kebebasan warga negara terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk aspirasi publik secara luas. Dengan kata lain bahwa pemilu merupakan simbol dari kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti rakyatlah yang memiliki kekuasaan yang tertinggi, rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, dan rakyat lah yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai.

Suatu negara yang berpenduduk sedikit, dan luas wilayah nya tidak terlalu besar kedaulatan rakyat tidak dapat berjalan dengan semurni-murninya apalagi dalam negara modern dimana jumlah penduduknya sudah banyak, wilayahnya cukup luas maka tidak mungkin meminta pendapat rakyat seorang demi seorang dalam menentukan jalannya pemerintahan, hal ini dikarenakan masyarakat modern sekarang ini spesialisasi semakin tajam dan tingkat kecerdasan rakyat tidak sama, hal inilah yang menyebabkan kedaulatan rakyat tidak mungkin dapat dilaksanakan secara murni keadaan menghendaki kedaulatan rakyat itu dilaksanakan dengan perwakilan.

Salah satu ciri negara demokrasi adalah melaksanakan pemilu dalam waktu-waktu tertentu. Pemilu pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.

Menurut A.S.S. Tambunan, “Pemilihan Umum merupakan sarana melaksanakan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-

wakilnya untuk melaksanakan pemerintahan”.⁴² Adapun menurut M. Rusli Karim, mengungkapkan “Pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat), yang berfungsi sebagai alat menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi.”

Senada dengan pendapat diatas menurut Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, juga mengatakan : “Pemilu adalah salah satu hak asasi warga Negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Dengan demikian pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi Negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.”⁴³

Oleh karena itu, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis yang dianut prinsip kedaulatan rakyat (Demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik. Baik dipilih maupun memilih dalam proses ini diselenggarakan Pemilihan Umum.

3. Tujuan Pemilihan Umum

Pemilu membawa pengaruh besar terhadap sistem politik suatu Negara. Melalui pemilu masyarakat berkesempatan berpartisipasi dengan memunculkan para calon pemimpin dan menyaring calon-calon tersebut. Pada hakikatnya pemilu, di negara manapun memiliki esensi yang sama. Pemilu berarti masyarakat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin

⁴² A.S.S Tambunan, *Pemilu di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD*, (Bandung : Binacipta, 2010), 3.

⁴³ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Pusat Studi Ilmu Hukum UI, 2002), 329.

rakyat atau pemimpin Negara. Pemimpin yang dipilih akan menjalankan kehendak rakyat yang memilihnya.

Menurut Parulian Donald,⁴⁴ ada dua manfaat yang sekaligus sebagai tujuan atau sasaran langsung yang hendak dicapai dengan pelaksanaan lembaga politik pemilu, yaitu pembentuk atau pemupukan kekuasaan yang absah (*otoritas*) dan mencapai tingkat keterwakilan politik (*political representativeness*). Dari sudut pandang tujuan kedua manfaat (tujuan) tersebut merupakan tujuan langsung yang berada dalam skala waktu relatif pendek.

Hal ini mengisyaratkan bahwa manfaatnya dirasakan segera setelah proses pemilu berlangsung. Adapun tujuan tidak langsung dihasilkan dari keseluruhan aktivitas dari semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu, baik kontestan, maupun para pelaksana dan pengawas dalam kurun waktu yang relative lama, yaitu pembudayaan politik dan pelembagaan politik. Dalam arti yang lebih sedarhana tujuan langsung berkaitan dengan hasil pemilu, sedangkan tujuan tidak langsung berkenaan dengan proses pencapaian hasil tersebut.

Dikutip dalam buku Titik Triwulan Tutik, Arbi Sanit menyimpulkan bahwa pemilu pada dasarnya memiliki empat fungsi utama yakni: 1) pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintahan; 2) pembentukan perwakilan politik rakyat; 3) sirkulasi elit penguasa; dan 4) pendidikan politik.

Sebagai sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia, maka pemilu bertujuan antara lain:

- a. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintah secara aman dan tertib;
- b. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat;
- c. Dalam rangka melaksanakan hak asasi warga Negara.

⁴⁴ *Ibid.*, 331.

Memang harus diakui tujuan pemilu secara signifikan berbeda menurut sistem politik yang ada, begitu juga fungsinya. Bagi sistem politik liberal pemilu bertujuan empat sistem pokok. Pertama, membentuk basis konsep demokrasi liberal. Tetapi pemilu, tanpa persaingan terbuka diantara kekuasaan sosial dan kelompok politik dalam menuju kekuasaan politik, maka tidak ada demokrasi. Kedua, pemilu melegitimasi sistem politik. Ketiga, mengabsahkan kepemimpinan politik. Keempat, pemilu sebagai unsur pokok partisipasi politik di Negara-negara demokrasi politik.

Sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam pembukaan pasal 1 UUD 1945⁴⁵ Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat, yang dimaksudkan disini adalah kedaulatan yang dipunyai oleh rakyat itu antara lain tercermin dilaksanakan pemilu dalam waktu tertentu. Karenanya pemilu adalah dalam rangka untuk memberi kesempatan kepada warga Negara untuk melaksanakan haknya, dengan tujuan:

- a. Untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan kedaulatan yang dipunyai;
- b. Terbuka kemungkinan baginya untuk duduk dalam badan perwakilan rakyat sebagai wakil yang dipercaya oleh para pemilihnya.

Ditinjau dari sudut kelompok warga Negara yang tergabung dalam partai politik, pemilu sangat besar artinya bagi partai politik karena bermanfaat:

- a. Untuk mengetahui seberapa besar sesungguhnya para pendukungnya
- b. Jika menang, sebagai media untuk menjalankan programnya.

Dengan demikian, maka pada dasarnya pemilu sangat penting artinya bagi warga Negara, partai politik dan pemerintah. Bagi pemerintah yang dihasilkan dari pemilu

⁴⁵ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1

yang jujur, berarti pemerintah itu mendapatkan dukungan yang sebenarnya dari rakyat, tetapi sebaliknya jika pemilu dilaksanakan tidak dengan jujur, maka dukungan rakyat tersebut hanya bersifat semu. Dari sudut pemilu sendiri, ketiga tujuan pemilu baru dapat tercapai jika pemilu dilaksanakan secara jujur. Sehingga setiap warga Negara yang berhak memilih memberikan pilihan sesuai hati nuraninya.

Menurut Jimly Asshiddiqie tujuan dari pemilihan umum ada 4, yaitu :

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintah secara tertib dan damai,
- b. Untuk memungkinkan terjadinya penggantian jabatan yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat
- d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara⁴⁶

4. Asas-asas Pemilihan Umum

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Untuk memilih pejabat negara, baik presiden atau wakil rakyat, dilakukan pemilihan umum secara langsung oleh masyarakat. Dalam pemilu di Indonesia menganut asas *luber jurdil*. *Luber jurdil* singkatan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebelum reformasi, pemilu hanya menganut asas *luber* (langsung, umum, bebas, rahasia) saja, namun setelah reformasi ditambah dua asas *jurdil* yakni (jujur dan adil).⁴⁷

⁴⁶ Didik Sukriono, "Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 1 (2009), 5.

⁴⁷ Abdul Bari Azed, "Pelaksanaan Asas-Asas Pemilihan Umum Oalam Undang-Undang Pemilihan Umum", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol.31, No. 2 (2005), 7.

a. Langsung

Yang pertama, asas pemilu menganut asas langsung. Hal ini berarti para pemilih diharuskan untuk memberikan suaranya secara langsung, tanpa perantara dan tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Asas ini berguna untuk menghindari kecurangan atau jual beli suara jika ada sistem perwakilan dalam pemungutan suara.

b. Umum

Asas pemilu berikutnya adalah umum. Maksudnya pemilihan umum diikuti oleh semua warga Indonesia yang telah memenuhi syarat tanpa terkecuali. Tidak ada perbedaan, semua orang dari berbagai suku, ras atau agama berhak mengikuti pemilu jika sesuai syarat yang telah ditetapkan sebelumnya dan telah memiliki hak pilih.

c. Bebas

Pemilu juga menganut asas bebas. Maksudnya pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pemilih bisa memilih siapa saja calon yang diinginkan sesuai hati nurani, dengan jaminan keamanan tanpa ada intervensi atau ancaman dari pihak-pihak mana saja.

d. Rahasia

Asas pemilu juga memuat asas rahasia. Hal ini berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Pemilu bersifat tertutup dan privasi dimana tidak ada yang tahu pilihan seseorang kecuali dia sendiri, tanpa ada campur tangan dari orang lain.

e. Jujur

Pemilu menganut asas jujur. Pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki

hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih.

f. Adil

Terakhir, asas pemilu adalah asas adil. Hal ini meliputi perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Penyelenggara pemilu harus memastikan keadilan bagi semua pihak selama proses pemilihan umum.

5. Ciri Pemilihan Umum.

Dalam sistem pemerintahan demokratis, kehadiran pemilu yang bebas dan adil merupakan suatu keniscayaan. Banyak ilmuan politik yang menggunakan pemilihan sebagai parameter demokrasi suatu Negara. Muhammad Asfar,⁴⁸ memberikan beberapa alasan mengapa pemilu sangat penting bagi kehidupan demokrasi. Pertama, melalui pemilu memungkinkan suatu komunitas politik melakukan transfer kekuasaan secara damai. Kedua, melalui pemilu akan tercipta pelembagaan konflik. Secara konseptual, terdapat dua mekanisme yang dapat melakukan untuk tercipta pemilu yang bebas dan adil, yaitu ;

- a. Menciptakan seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih kedalam suatu lembaga perwakilan rakyat secara adil (*electoral sytem*);
- b. Menjalani pemilu sesuai dengan aturan main dan prinsip-prinsip demokrasi (*electoral process*)

Sementara itu Ranney, menyebutkan bahwa ciri- ciri suatu pemilu yang benar-benar bebas, meliputi: (1) diselenggarakan secara leguler; (2) pemilihan yang benar-benar berarti; (3) kebebasan menempatkan calon; (4) kebebasan mengetahui dan mendeteksi pilihan-pilihan; (5)

⁴⁸ Muhammad Asfar, *Pemilihan Umun dan Perilaku memilih 1955-2004*, (Surabaya : Pustaka Eurika, 2006), 3-4.

hak pilih orang dewasa yang universal; (6) perlakuan yang sama dalam pemberian suara; (7) pendaftaran pemilih yang bebas; dan (8) penghitungan dan pelaporan hasil yang tepat.

Sistem pemilu hakikatnya merupakan seperangkat metode yang mengatur warga Negara dalam memilih para wakilnya dalam suatu kelembagaan perwakilan rakyat, seperti halnya parlemen. Dengan demikian, dapat juga dikatakan bahwa sistem pemilihan dapat berupa seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih dalam suatu kursi diparlemen. Sistem pemilihan sendiri memiliki arti penting terutama berkaitan dengan sistem pemerintahan berdasarkan demokrasi perwakilan. Ada beberapa alasan yang memperkuat argumen tersebut, antara lain⁴⁹:

- a. Sistem pemilihan memiliki konsekuensi pada tingkat proporsionalitas hasil pemilihan;
- b. Sistem pemilihan mempunyai pengaruh pada jenis kabinet yang akan dibentuk, yaitu apakah kabinet satu partai atau koalisi.
- c. Sistem pemilihan mempunyai dampak pada bentuk sistem kepartaian, terutama berkaitan dengan jumlah partai;
- d. Sistem pemilihan mempunyai pengaruh akuntabilitas pada pemerintahan;
- e. Sistem pemilihan mempunyai dampak pada tingkat kohesi partai;
- f. Sistem pemilihan berpengaruh pada bentuk dan tingkat partisipasi politik masyarakat
- g. Sistem pemerintahan merupakan elemen demokrasi yang lebih mudah untuk dimanipulasi dibandingkan dengan elemen demokrasi lain.
- h. Sistem pemilihan dapat dimanipulasi melalui berbagai peraturan yang demokratis dalam implementasinya.

⁴⁹ *Ibid.*, 10.

C. Tata Cara Pemilu di Indonesia

Pemilihan umum (Pemilu) adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari jabatan Presiden (eksekutif), wakil rakyat (legislatif) di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi.

Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis. Sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik Indonesia.⁵⁰ Sampai sekarang pemilu masih dianggap sebagai suatu peristiwa kenegaraan yang penting. Hal ini karena pemilu melibatkan seluruh rakyat secara langsung. Melalui pemilu, rakyat juga bisa menyampaikan keinginan dalam politik atau sistem kenegaraan.

Sistem Pemilihan Umum merupakan metode yang mengatur serta memungkinkan warga negara memilih atau mencoblos para wakil rakyat diantara mereka sendiri. Metode berhubungan erat dengan aturan dan prosedur merubah atau mentransformasi suara ke kursi di parlemen. Mereka sendiri maksudnya adalah yang memilih ataupun yang hendak dipilih juga merupakan bagian dari sebuah entitas yang sama.

Bangsa Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum sejak zaman kemerdekaan. Semua pemilihan umum itu tidak diselenggarakan dalam kondisi yang *vacuum*, tetapi berlangsung di dalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan umum tersebut. Dari pemilu yang telah

⁵⁰ Nurhidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia*, (Yogyakarta : Fajar Media Press, 2011), 54.

diselenggarakan juga dapat diketahui adanya usaha untuk menemukan sistem pemilihan umum yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia.⁵¹

a. Zaman Demokrasi Parleментар (1945-1959)

Pada masa ini pemilu diselenggarakan oleh kabinet BH-Baharuddin Harahap (tahun 1955). Pada pemilu ini pemungutan suara dilaksanakan 2 kali yaitu yang pertama untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan September dan yang kedua untuk memilih anggota Konstituante pada bulan Desember. Sistem yang diterapkan pada pemilu ini adalah *sistem pemilu proporsional*. Pelaksanaan pemilu pertama ini berlangsung dengan demokratis dan khidmat, Tidak ada pembatasan partai politik dan tidak ada upaya dari pemerintah mengadakan intervensi atau campur tangan terhadap partai politik dan kampanye berjalan menarik. Pemilu ini diikuti 27 partai dan satu perorangan. Akan tetapi stabilitas politik yang begitu diharapkan dari pemilu tidak tercapai. Kabinet Ali (I dan II) yang terdiri atas koalisi tiga besar: NU, PNI dan Masyumi terbukti tidak sejalan dalam menghadapi beberapa masalah terutama yang berkaitan dengan konsepsi Presiden Soekarno zaman Demokrasi Parleментар berakhir.⁵²

b. Zaman Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Setelah pencabutan Maklumat Pemerintah pada November 1945 tentang keleluasaan untuk mendirikan partai politik, Presiden Soekarno mengurangi jumlah partai politik menjadi 10 parpol. Pada periode Demokrasi Terpimpin tidak diselenggarakan pemilihan umum.

c. Zaman Demokrasi Pancasila (1965-1998)

Setelah turunnya era Demokrasi Terpimpin yang semi-otoriter, rakyat berharap bisa merasakan sebuah sistem

⁵¹ Widianingsih, "Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia", *Jurnal Signal*, Vol. 5, No. 2, (2017), 9.

⁵² Ahmad Syafii Maarif, *Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia, dalam Aspirasi Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: Leppenias, 1983), 54.

politik yang demokratis & stabil. Upaya yang ditempuh untuk mencapai keinginan tersebut diantaranya melakukan berbagai forum diskusi yang membicarakan tentang sistem distrik yang terdengar baru di telinga bangsa Indonesia.

Pendapat yang dihasilkan dari forum diskusi ini menyatakan bahwa sistem distrik dapat menekan jumlah partai politik secara alamiah tanpa paksaan, dengan tujuan partai-partai kecil akan merasa berkepentingan untuk bekerjasama dalam upaya meraih kursi dalam sebuah distrik. Berkurangnya jumlah partai politik diharapkan akan menciptakan stabilitas politik dan pemerintah akan lebih kuat dalam melaksanakan program-programnya, terutama di bidang ekonomi.

Karena gagal menyederhanakan jumlah partai politik lewat sistem pemilihan umum, Presiden Soeharto melakukan beberapa tindakan untuk menguasai kehidupan kepartaian. Tindakan pertama yang dijalankan adalah mengadakan fusi atau penggabungan diantara partai politik, mengelompokkan partai-partai menjadi tiga golongan yakni Golongan Karya (Golkar), Golongan Nasional (PDI), dan Golongan Spiritual (PPP). Pemilu tahun 1977 diadakan dengan menyertakan tiga partai, dan hasilnya perolehan suara terbanyak selalu diraih Golkar.

d. Zaman Reformasi (1998- Sekarang)

Pada masa Reformasi 1998, terjadilah liberisasi di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik Indonesia merasakan dampak serupa dengan diberikannya ruang bagi masyarakat untuk merepresentasikan politik mereka dengan memiliki hak mendirikan partai politik. Banyak sekali parpol yang berdiri di era awal reformasi. Pada pemilu 1999 partai politik yang lolos verifikasi dan berhak

mengikuti pemilu ada 48 partai. Jumlah ini tentu sangat jauh berbeda dengan era orba.⁵³

Pada tahun 2004 peserta pemilu berkurang dari 48 menjadi 24 parpol saja. Ini disebabkan telah diberlakukannya ambang batas (*Electroral Threshold*) sesuai UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, yang mengatur bahwa partai politik yang berhak mengikuti pemilu selanjutnya adalah parpol yang meraih sekurang-kurangnya 2% dari jumlah kursi DPR. Partai politik yang tidak mencapai ambang batas boleh mengikuti pemilu selanjutnya dengan cara bergabung dengan partai lainnya dan mendirikan parpol baru. Untuk partai politik baru. Persentase *threshold* dapat dinaikkan jika dirasa perlu seperti persentasi *Electroral Threshold* 2009 menjadi 3% setelah sebelumnya pemilu 2004 hanya 2%. Begitu juga selanjutnya pemilu 2014 ambang batas bisa juga dinaikan lagi atau diturunkan.

Pemilu dianggap sebagai bentuk paling riil dari demokrasi serta wujud paling konkret keiktsertaan (partisipasi) rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu, sistem dan penyelenggaraan pemilu hampir selalu menjadi pusat perhatian utama karena melalui penataan, sistem & kualitas penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan demokratis.

D. Hak Pilih dan Permasalahannya

1. Hak Pilih

Bagi bangsa Indonesia UUD 1945 telah memberikan jaminan terhadap hak-hak asasi. Keterikatan bangsa Indonesia terhadap masalahmasalah hak asasi, dapat dilihat dari pengaturan hak hak dasar yang dimuat dalam konstitusi.

⁵³ Topo Santoso, "Proses Pemilu Di Indonesia", *Jurnal Heinonline*, Vol. 1, No. 4 (2004), 12.

Pengaturan tersebut bukan hanya memuat hak-hak hukum dan politik, tapi juga dibidang sosial ekonomi dan budaya.⁵⁴

Menurut Jimly Asshiddiqie hak asasi manusia terbagi menjadi beberapa kelompok. Salah satunya adalah kelompok hak politik, ekonomi, sosial budaya. Dan yang termasuk hak-hak politik adalah Pertama, setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat. Kedua, setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan publik.

Menurut Undang-undang no. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, warga Negara Indonesia yang waktu pendaftaran pemilih untuk Pemilihan Umum tertera pada pasal 198 yaitu :⁵⁵

- a. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.
- b. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih.
- c. Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.

Dari Ketentuan tersebut jelas, bahwa pada hakikatnya setiap warga Negara Indonesia memiliki hak memilih. Warga Negara Indonesia adalah setiap penduduk (orang) yang menurut undang-undang no. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia adalah warga Negara Indonesia. Orang-orang yang bukan warga Negara Indonesia adalah orang asing dan mereka tidak memiliki hak pilih di Indonesia. Meskipun setiap warga Negara Indonesia (laki-laki dan wanita) mempunyai hak untuk memilih, namun UU

⁵⁴ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar maju, 2017), 241.

⁵⁵ Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk menetapkan batas umur adalah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum.

Adapun ketentuan umur 17 tahun adalah berdasarkan perkembangan politik di Indonesia, bahwa warga Negara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun ternyata sudah mempunyai pertanggungjawaban politik terhadap Negara dan masyarakat, sehingga sewajarnya diberikan hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota badan – badan perwakilan rakyat.

Namun, pada pasal-pasal didalam UU Pemilu ada warga Negara Indonesia tidak memiliki hak pilih yaitu :⁵⁶

- a. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tidak memiliki hak pilih meskipun TNI dan POLRI adalah warga Negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 200 Undang-Undang pemilu yaitu “Dalam Pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih.”
- b. Warga Negara yang telah di cabut hak politiknya oleh pengadilan. Hal ini sesuai dengan pasal 198 ayat (3) yaitu : “Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.”

2. Permasalahan dalam hak pilih

Hak pilih warga negara merupakan unsur paling esensial dan fundamental dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada. Tidak heran jika Penyelenggara Pemilu, menjaga hak pilih adalah salah satu tugas utama. Dalam kajian perilaku pemilih hanya ada dua konsep utama, yaitu perilaku memilih (*voting behavior*) dan perilaku tidak memilih (*non voting*)

⁵⁶ Muchtar Pakpahan, *Ilmu Negara dan Politik*, (Jakarta: Bumi Intitarma Sejahtera, 2006), 145.

behavior). David Moon mengatakan ada dua pendekatan teoritik utama dalam menjelaskan perilaku non-voting yaitu: pertama, menekankan pada karakteristik sosial dan psikologi pemilih dan karakteristik institusional sistem pemilu; dan kedua, menekankan pada harapan pemilih tentang keuntungan dan kerugian atas keputusan mereka untuk hadir atau tidak hadir memilih.⁵⁷

Istilah golput muncul pertama kali menjelang pemilu pertama zaman Orde Baru tahun 1971. Pemakarsa sikap untuk tidak memilih itu, antara lain Arief Budiman, Julius Usman dan almarhum Imam Malujo Sumali. Langkah mereka didasari pada pandangan bahwa aturan main berdemokrasi tidak ditegakkan, cenderung diinjak-injak.

Golput menurut Arif Budiman bukan sebuah organisasi tanpa pengurus tetapi hanya merupakan pertemuan solidaritas (Arif Budiman). Sedangkan Arbi Sanit mengatakan bahwa golput adalah gerakan protes politik yang didasarkan pada segenap problem kebangsaan, sasaran protes dari gerakan golput adalah penyelenggaraan pemilu. Mengenai golput alm. KH. Abdurrahman Wahid pernah mengatakan “kalau tidak ada yang bisa di percaya, ngapain repot-repot ke kotak suara, dari pada nanti kecewa”

Sikap orang-orang golput, menurut Arbi Sanit dalam memilih memang berbeda dengan kelompok pemilih lain atas dasar cara penggunaan hak pilih. Apabila pemilih umumnya menggunakan hak pilih sesuai peraturan yang berlaku atau tidak menggunakan hak pilih karena berhalangan di luar kontrolnya, kaum golput menggunakan hak pilih dengan tiga kemungkinan. Pertama, menusuk lebih dari satu gambar partai. Kedua, menusuk bagian putih dari kartu suara. Ketiga, tidak mendatangi kotak suara dengan kesadaran untuk tidak menggunakan hak pilih. Bagi mereka, memilih dalam pemilu

⁵⁷ Amiruddin dan A. Zaini Bisri, *Pilkada Langsung : Problem dan Prospek*, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2005), 25.

sepenuhnya adalah hak. Kewajiban mereka dalam kaitan dengan hak pilih ialah menggunakannya secara bertanggungjawab dengan menekankan kaitan penyerahan suara kepada tujuan pemilu, tidak hanya membatasi pada penyerahan suara kepada salah satu kontestan pemilu.

Eep Saefulloh Fatah, mengklasifikasikan golput atas empat golongan. *Pertama*, golput teknis, yakni mereka yang karena sebab-sebab teknis tertentu (seperti keluarga meninggal, ketiduran, dan lain-lain) berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau mereka yang keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah. *Kedua*, golput teknis-politis, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara pemilu). *Ketiga*, golput politis, yakni mereka yang merasa tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan. Keempat, golput ideologis, yakni mereka yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tak mau terlibat di dalamnya entah karena alasan fundamentalisme agama atau alasan politik-ideologi lain.

Berangkat dari penjelasan ini dalam pemahaman penulis faktor yang menyebabkan masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya secara sederhana dapat di klasifikasikan kedalam dua kelompok besar yaitu faktor dari internal pemilih dan faktor eksternal. Faktor internal yang penulis maksud adalah alasan pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu bersumber dari dirinya sendiri, sedangkan eksternal alasan tersebut datang dari luar dirinya. Secara terperinci dapat dilihat berikut ini⁵⁸ :

a. Faktor Internal

1) Faktor Teknis

Faktor teknis yang penulis maksud adalah adanya kendala yang bersifat teknis yang dialami oleh pemilih

⁵⁸ *Ibid.*, 39.

sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilih. Seperti pada saat hari pencoblosan pemilih sedang sakit, pemilih sedang ada kegiatan yang lain serta berbagai hal lainnya yang sifatnya menyangkut pribadi pemilih. Kondisi itulah yang secara teknis membuat pemilih tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Faktor teknis ini dalam pemahaman dapat di klasifikasikan ke dalam dua hal yaitu teknis mutlak dan teknis yang bisa di tolerir. Teknis mutlak adalah kendala yang serta merta membuat pemilih tidak bisa hadir ke TPS seperti sakit yang membuat pemilih tidak bisa keluar rumah. Sedang berada di luar kota. Kondisi yang seperti yang penulis maksud teknis mutlak. Teknis yang dapat di tolerir adalah permasalahan yang sifatnya sederhana yang melakat pada pribadi pemilih yang mengakibatkan tidak datang ke TPS. Seperti ada keperluan keluarga, merencanakan liburan pada saat hari pemilihan. Pada kasus-kasus seperti ini dalam pemahaman penulis pemilih masih bisa mensiasatinya, yaitu dengan cara mendatangi TPS untuk menggunakan hak pilih terlebih dahulu baru melakukan aktivitas atau keperluan yang bersifat pribadi.⁵⁹

Pemilih golput yang karena alasan teknis yang tipe kedua ini cenderung tidak mengetahui essensi dari menggunakan hak pilih, sehingga lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada menggunakan pilihnya. Pemilih ideal harus mengetahui dampak dari satu suara yang diberikan dalam pemilu. Hakikatnya suara yang diberikan itulah yang menentukan pemimpin lima tahun mendatang. Dengan memilih pemimpin yang baik berarti pemilih berkontribusi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik pula.

⁵⁹ Alexsander Yandra, "Penyelamatan Hak Pilih Warga Perbatasan Jelang Pilkada", *Jurnal Kajian Politik*, Vol. 13, No. 1, (2017), 5.

2) Faktor Pekerjaan

Faktor pekerjaan adalah pekerjaan sehari-hari memilih. Faktor pekerjaan memilih ini dalam pemahaman penulis memiliki kontribusi terhadap jumlah orang yang tidak memilih. Berdasarkan data Sensus Penduduk Indonesia tahun 2010 dari 107,41 juta orang yang bekerja, paling banyak bekerja di sektor pertanian yaitu 42,83 juta orang (39,88 persen), disusul sektor perdagangan sebesar 22,21 juta orang (20,68 persen), dan sektor jasa kemasyarakatan sebesar 15,62 juta orang (14,54 persen). Data yang hampir sama di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Data BPS 2010, sebanyak 31,9% penduduk bekerja di sektor industri, sektor jasa kemasyarakatan sebesar 20,7%, sektor perdagangan sebesar 18,18% dan pertanian dan perkebunan 13,5%. Data di atas menunjukkan sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor informal, dimana penghasilannya sangat terkait dengan intensitasnya bekerja. Banyak dari sektor informal yang baru mendapatkan penghasilan ketika mereka bekerja, tidak bekerja berarti tidak ada penghasilan. Seperti tukang ojek, buruh harian, nelayan, petani harian.

Kemudian ada pekerjaan masyarakat yang mengharuskan mereka untuk meninggalkan tempat tinggalnya seperti para pelaut, penggali tambang. Kondisi seperti membuat mereka harus tidak memilih, karena faktor lokasi mereka bekerja yang jauh dari TPS. Maka dalam pemahaman penulis faktor pekerjaan cukup signifikan pada faktor internal membuat memilih untuk tidak memilih. Memilih dalam kondisi seperti ini dihadapkan pada dua pilihan menggunakan hak pilih yang akan mengancam berkurang yang penghasilannya atau pergi bekerja dan tidak memilih.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal faktor yang berasal dari luar yang mengakibatkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Ada tiga yang masuk pada kategori ini menurut pemilih yaitu aspek administratif, sosialisasi dan politik.⁶⁰

1) Faktor Administratif

Faktor administratif adalah faktor yang berkaitan dengan aspek administrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Diantaranya tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapatkan kartu pemilihan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP). Hal-hal administratif seperti inilah yang membuat pemilih tidak bisa ikut dalam pemilihan. Pemilih tidak akan bisa menggunakan hak pilih jika tidak terdaftar sebagai pemilih. Kasus pemilu legislatif 2009 adalah buktinya banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak bisa ikut dalam pemilu karena tidak terdaftar sebagai pemilih. Jika kondisi yang seperti ini terjadi maka secara otomatis masyarakat akan tergabung kedalam kategori golput.

Faktor berikut yang menjadi penghalang dari aspek administrasi adalah permasalahan kartu identitas. Masih ada masyarakat tidak memiliki KTP. Jika masyarakat tidak memiliki KTP maka tidak akan terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) karena secara administratif KTP yang menjadi rujukan dalam mendata dan membuat DPT. Maka masyarakat baru bisa terdaftar sebagai pemilih minimal sudah tinggal 6 bulan di satu tempat. Golput yang diakibatkan oleh faktor administratif ini bisa diminimalisir jika para petugas pendata pemilih melakukan pendataan secara benar dan maksimal untuk mendatangi rumah-rumah pemilih. Selain itu dituntut

⁶⁰ *Ibid.*, 7.

inisiatif masyarakat untuk mendatangi petugas pendataan untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih. Langkah berikutnya DPS (Daftar Pemilih Sementara) harus tempel di tempat-tempat strategis agar bisa dibaca oleh masyarakat. Masyarakat juga harus berinisiatif melacak namanya di DPS, jika belum terdaftar segera melapor ke pengurus RT atau petugas pendataan. Langkah berikut untuk meminimalisir terjadi golput karena aspek administrasi adalah dengan memanfaatkan data kependudukan berbasis IT. Upaya elektronik Kartu Tanda Penduduk (E KTP) yang dilakukan pemerintahan sekarang dalam pandangan penulis sangat efektif dalam meminimalisir golput administratif.

2) Faktor Sosialisasi

Sosialisasi atau menyebarluaskan pelaksanaan pemilu di Indonesia sangat penting dilakukan dalam rangka meminimalisir golput. Hal ini disebabkan intensitas pemilu di Indonesia cukup tinggi mulai dari memilih kepala desa, bupati/walikota, gubernur pemilu legislatif dan pemilu presiden hal ini belum dimasukkan pemilihan yang lebih kecil RT/ RW. Kondisi lain yang mendorong sosialisasi sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah dalam setiap pemilu terutama pemilu di era reformasi selalu diikuti oleh sebagian peserta pemilu yang berbeda. Pada Pemilu 1999 diikuti sebanyak 48 partai politik, pada pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai politik dan pemilu 2009 diikuti oleh 41 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal di Aceh.

Kondisi ini menuntut perlunya sosialisasi terhadap masyarakat. Permasalahan berikut yang menuntut perlunya sosialisasi adalah mekanisme pemilihan yang berbeda antara pemilu sebelum reformasi dengan pemilu sebelumnya. Dimana pada era orde baru hanya

memilih lambang partai sementara sekarang selain memilih lambang juga harus memilih nama salah satu calon di partai tersebut. Perubahan yang signifikan adalah pada pemilu 2009 dimana kita tidak lagi mencoblos dalam memilih tetapi dengan cara menandai. Kondisi ini semualah yang menuntut pentingnya sosialisasi dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pemilu dan meminimalisir angka golput dalam setiap pemilu. Terlepas dari itu semua penduduk di Indonesia sebagai besar berada di pedesaan maka menyebar luaskan informasi pemilu dinilai penting, apalagi bagi masyarakat yang jauh dari akses transportasi dan informasi, maka sosialisasi dari mulut ke mulut menjadi faktor kunci mengurangi angka golput.

3) Faktor Politik

Faktor politik adalah alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti ketidak percaya dengan partai, tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Stigma politik itu kotor, jahat, menghalalkan segala cara dan lain sebagainya memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap politik sehingga membuat masyarakat enggan untuk menggunakan hak pilih. Stigma ini terbentuk karena tabiat sebagian politisi yang masuk pada kategori politik instan. Politik dimana baru mendekati masyarakat ketika akan ada agenda politik seperti pemilu. Maka kondisi ini meruntuhkan kepercayaan masyarakat pada politisi. Faktor lain adalah para politisi yang tidak mengakar, politisi yang dekat dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Sebagian politisi lebih dekat dengan para petinggi partai, dengan

pemegang kekuasaan. Mereka lebih menngantungkan diri pada pemimpinnya di bandingkan mendekatkan diri dengan konstituen atau pemilihnya. Kondisi lain adalah tingkah laku politisi yang banyak berkonflik mulai konflik internal partai dalam mendapatkan jabatan strategis di partai, kemudian konflik dengan politisi lain yang berbeda partai.⁶¹

Konflik seperti ini menimbulkan anti pati masyarakat terhadap partai politik. Idealnya konflik yang di tampilkan para politisi seharusnya tetap mengedepankan etika politik (fatsoen). Politik pragmatismis yang semakin menguat, baik dikalangan politisi maupun di sebagian masyarakat. Para politisi hanya mencari keuntungan sesaat dengan cara mendapatkan suara rakyat. Sedangkan sebagian masyarakat kita, politik dengan melakukan transaksi semakin menjadi-jadi. Baru mau mendukung, memilih jika ada mendapatkan keuntungan materi, maka muncul ungkapan kalau tidak sekarang kapan lagi, kalau sudah jadi/terpilih mereka akan lupa janji. Kondisi-kondisi yang seperti penulis uraikan ini yang secara politik memengaruhi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Sebagian Masyarakat semakin tidak yakin dengan politisi. Harus diakui tidak semua politisi seperti ini, masih banyak politisi yang baik, namun mereka yang baik tenggelam dikalahkan politisi yang tidak baik.

E. Hak dan Kewajiban Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu

Konsepsi demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang strategis dalam sistem ketatanegaraan. Walaupun pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Karena berbagai varian

⁶¹ *Ibid.*, 9.

implementasi demokrasi tersebut, maka di dalam literatur kenegaraan dikenal beberapa istilah demokrasi yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan lain sebagainya.⁶² Sedangkan salah satu prinsip negara demokrasi adalah perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam suatu masyarakat hukum yang lebih rendah diputuskan oleh badan perwakilan, yang diisi melalui pemilihan umum.⁶³

Sejatinya negara hukum sangat melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), Indonesia sebagai negara hukum diharuskan menjaga dan melindungi HAM yang sudah diatur secara tegas dalam Pasal 28 A-J UUD 1945. Negara Hukum pada prinsipnya adalah Negara yang menjunjung tinggi supremasi Hukum, dimana konstitusi dan peraturan hukum atau regulasi menjadi acuan nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada negara hukum. Perlindungan HAM serta peran serta masyarakat dalam Pemilu. Salah satu prinsip negara hukum adalah perlindungan terhadap HAM, Indonesia sebagai negara hukum telah mengimplementasikan prinsip tersebut dalam Pasal 28 A-J UUD 1945. Perwakilan politik sebagai salah satu prinsip negara demokrasi dapat dilihat dalam pemilihan umum, yaitu dengan keterlibatan rakyat dalam menggunakan hak politiknya. Menurut Rousseau, konsep demokrasi di Indonesia mengedepankan konsep kedaulatan rakyat, artinya adalah cara atau sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum yang bersifat abstrak, kehendak umum yang dimaksud adalah kehendak rakyat.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang dihasilkan dari Pemilu diharapkan menjadi pemerintahan yang

⁶² Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara, Cetakan ke-2*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1988), 167 – 191.

⁶³ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2013), 5.

mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Pemilu pun menjadi tonggak tegaknya demokrasi, di mana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk satu periode pemerintahan ke depan. Keberhasilan pemilu tentunya dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat kesadaran politik setiap warga negara. Kesadaran politik ini terefleksi dari seberapa besar partisipasi dan peran masyarakat dalam proses pemilu, dengan memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memberikan suara dukungannya dalam proses penetapan pemerintah baik di eksekutif maupun legislatif selaku pemangku kebijakan.⁶⁴

Persyaratan hak pilih penyandang disabilitas berdasarkan UUD 1945. Perubahan sistem politik dan kekuasaan negara pasca terjadinya amandemen UUD 1945 telah membawa angin segar bagi perkembangan cita demokrasi dan konstitusionalisme Indonesia. Salah satu implikasinya, telah terjadi pergeseran kekuasaan dari supremasi parlemen (*parliament supremacy*) menuju supremasi konstitusi (*constitutional supremacy*). Kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*) yang dahulu berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kini telah berubah menjadi terletak di tangan rakyat.⁶⁵ Kedaulatan rakyat yang dimaksud salah satunya adalah peran aktif masyarakat dalam pemilu.

Sesuai prinsip kedaulatan rakyat, maka seluruh aspek penyelenggaraan pemilu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Tidak adanya jaminan terhadap hak warga negara dalam memilih pemimpin negaranya merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi. Terlebih lagi, Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Pada prinsipnya persyaratan memilih penyandang disabilitas pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

⁶⁴ *Ibid.*, 7.

⁶⁵ Pan Mohamad Faiz, "Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 3 (2018), 85.

tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) tidak bertentangan dengan Pasal 22E UUD 1945. Pasal 22E UUD 1945, tidak disebutkan tentang persyaratan memilih, karena UUD 1945 telah memerintahkan pengaturan lebih lanjut tentang pemilu kepada undang-undang. Menurut Hans Kelsen UUD memerintahkan pembentukan undang-undang karena konstitusi adalah urutan tertinggi dalam tata hukum nasional.⁶⁶ Pertentangan terjadi pada Pasal 28D ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal ini memberikan tafsir bahwa kesempatan yang sama termasuk juga dalam menentukan siapa pemerintah yang layak dalam menyelesaikan urusan pemerintahan. Ketentuan mengenai persyaratan memilih penyandang disabilitas tersebut merupakan pengingkaran terhadap hak asasi warga negara atau diskriminasi atas dasar keyakinan politik. Padahal UUD 1945 tidak membenarkan adanya diskriminasi berdasarkan perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik.

Hak pilih juga diatur dalam Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6A (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat melaksanakan hak pilihnya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan umum sudah seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Berkaitan dengan keberterangan persyaratan Hak Pilih penyandang disabilitas dengan UUD 1945. Hal ini tentu bertentangan, apalagi hak politik secara nyata tegas dilindungi dalam Pasal 28D ayat (3). Pasal tersebut bermaksud memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara Indonesia

⁶⁶ Bayu Dwi A, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2014), 70.

untuk ikut serta dan ikut terlibat dalam pemerintahan, baik sebagai pemilih maupun calon pemerintah yang akan dipilih.⁶⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right (UU Pengesahan ICCPR). Apabila melihat Pasal 1 huruf a dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU Perjanjian Internasional) maka yang dimaksud dengan perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Ratifikasi pada hakikatnya merupakan salah satu cara pengesahan sebuah perjanjian internasional untuk dapat dijadikan salah satu produk hukum di negara-negara peserta perjanjian tersebut. Istilah pengesahan yang dipergunakan dalam praktik hukum perjanjian internasional di Indonesia khususnya UU Perjanjian Internasional diambil dan diterjemahkan dari istilah ratifikasi.

Sebagaimana Pasal 2 ayat (1) b Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional, ratifikasi dapat diartikan "*Ratification*", "*acceptance*", "*approval*" and "*accession*" *meanin each case the international act so named whereby a State establishes on the international plane its consent to be bound by atreary*.⁶⁸ Pelaksanaan terhadap berlakunya undang-undang tentunya menjadi suatu kewajiban tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat harus berperan aktif dalam pelaksanaan juga pengawasan.⁶⁹ Termasuk juga undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional yang dilaksanakan oleh Indonesia. Dalam UU Pengesahan ICCPR tidak ada pasal yang membatasi atau mengisyaratkan bahwa harus ada syarat-syarat tambahan tentang hak pilih bagi penyandang disabilitas. Pada Pasal 5 UU

⁶⁷ *Ibid.*, 73.

⁶⁸ Agusman Damos Dumoli, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 69.

⁶⁹ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2013), 60.

Pengesahan ICCPR dijelaskan secara gamblang tentang hal tersebut. Pasal 5 menyatakan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak kepada negara, kelompok, atau seseorang untuk melibatkan diri dalam kegiatan. Hal ini bertujuan untuk menghancurkan hak atau kebebasan mana pun yang diakui dalam kovenan ini atau membatasinya lebih daripada yang ditetapkan dalam Kovenan ini.

Pasal ini juga melarang dilakukannya pembatasan atau penyimpangan HAM mendasar yang diakui atau yang berlaku di negara pihak berdasarkan hukum, konvensi, peraturan, atau kebiasaan. Dengan dalih bahwa kovenan ini tidak mengakui hak tersebut atau mengakuinya tetapi secara sempit. Dalam ICCPR tidak disebutkan atau didefinisikan bahwa hak politik penyandang disabilitas dapat dikurangi, bahkan pengurangan hak politik tidak dapat dilakukan. Karena sejatinya ICCPR dengan melindungi hak politik setiap orang tanpa membedakan keadaan kesehatan, artinya persyaratan pemilih penyandang disabilitas sangat bertentangan dengan hak politik penyandang disabilitas.

Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.135/PUU-XIII/2015 perihal hak pilih disabilitas mental dalam pemilu juga menyebutkan bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada UUD 1945 yaitu: Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Kemudian dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Berdasarkan dasar-dasar hukum di atas, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penjelasan hukum yang berbunyi: “untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: untuk dapat menggunakan hak pilihnya, warga Negara Indonesia harus

terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi syarat: tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya”.

Disabilitas mental adalah sebuah kondisi episodik, atau tidak permanen. Meskipun penderita mengalami disabilitas dalam sebagian fungsi mentalnya, mereka tetap bisa hidup normal dan mampu menentukan yang terbaik menurut diri mereka. Syarat untuk menjadi pemilih dalam pemilu adalah berusia 17 tahun dan atau sudah menikah. Tidak ada persyaratan yang menyebutkan pemilih sedang tidak terganggu jiwa/ingatannya. Artinya, semua warga negara yang sudah punya hak pilih, termasuk penyandang disabilitas, wajib didata tanpa terkecuali. Persoalan mereka nanti bisa menggunakan hak pilihnya atau akan mencoblos atau tidak, adalah persoalan berbeda. Tapi negara harus memenuhi hak setiap warga negara untuk bisa didata sebagai pemilih. untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: untuk dapat menggunakan hak pilihnya, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi syarat: tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya

F. Disabilitas Dalam Islam

Manusia sebagai makhluk Tuhan tetaplah berjenis satu. Keberagaman manusia yaitu setiap manusia memiliki perbedaan. Perbedaan itu ada karena manusia adalah makhluk/individu yang setiap individu memiliki ciri-ciri khas tersendiri.⁷⁰ Perbedaan individu dapat dilihat dari berbagai aspek baik itu perbedaan warna kulit, suku, ras, fisik, kaya, miskin, mulia, lemah, kuat dan sebagainya. Perbedaan individu dapat dilihat pada penyandang disabilitas yang mendapat perlakuan diskriminasi di masyarakat maka dari itu ditetapkan Undang-undang. Sebagaimana telah tercantum dalam Undang-undang No.8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas guna untuk memberi kebebasan dari rasa

⁷⁰ Herimanto dan Winamo, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 97.

takut dan perlu adanya jaminan untuk mendapatkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Islam memandang penyandang disabilitas secara fisik adalah sebagai berikut:

1. Bertindak sama atau bersikap toleransi terhadap sesama, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah ‘Abasa ayat 2 :

أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى ٢

“*karena seorang buta telah datang kepadanya (Abdullah bin Ummi Maktum)*” (Q.S. ‘Abasa : 2).⁷¹

(telah datang seorang buta kepadanya) yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Nabi saw. tidak melayaninya karena pada saat itu ia sedang sibuk menghadapi orang-orang yang diharapkan untuk dapat masuk Islam, mereka terdiri dari orang-orang terhormat kabilah Quraisy, dan ia sangat menginginkan mereka masuk Islam. Sedangkan orang yang buta itu atau Abdullah bin Umi Maktum tidak mengetahui kesibukan Nabi saw. pada waktu itu, karena ia buta. Maka Abdullah bin Umi Maktum langsung menghadap dan berseru, "Ajarkanlah kepadaku apa-apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Akan tetapi Nabi saw. pergi berpaling darinya menuju ke rumah, maka turunlah wahyu yang menegur sikapnya itu, yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam surat ini. Nabi saw. setelah itu, apabila datang Abdullah bin Umi Maktum berkunjung kepadanya, beliau selalu mengatakan, "Selamat datang orang yang menyebabkan Rabbku menegurku karenanya," lalu beliau menghamparkan kain serbannya sebagai tempat duduk Abdullah bin Umi Maktum.

2. Memberi keringanan untuk tidak melaksanakan secara sempurna kewajiban-kewajiban yang menuntun panca indra dan anggota fisiknya, tidak mendiskriminasi, mempunyai hak untuk memilih dan menyambung silaturahmi.

⁷¹ Q.S. ‘Abasa : 2

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 61,

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَرَكََةً طَيِّبَةً ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

Artinya : “Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh

berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) bagimu, agar kamu mengerti”.
(Q.S. An-Nur : 61).⁷²

3. Diperbolehkan untuk tidak ikut berperang, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-fath ayat 7,

وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝٧

“Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.
(Q.S. Al-Fath : 7)⁷³

Dari tiga pandangan Al-Quran di atas bahwa menjadi dasar untuk bersikap toleransi terhadap sesama tanpa membedakan terutama terhadap penyandang disabilitas dan tidak bersikap diskrimansi terhadap penyandang disabilitas. Sependapat dengan Cece Abdulwaly dalam bukunya Bela Al-Quran Agar Al-Quran membela kita dan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai Pedoman Hidup karangan Ibnu Khalil bahwa ayat-ayat Al-Quran menjelaskan hukum-hukum, larangan, perintah dan Ayat-ayat Al-Quran ini sebagai pedoman untuk manusia dalam berkomunikasi dan bersosialisasi. Sebagaimana dipertegasakan juga dalam Q.S. Al-Hujurat : 11 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّغَابِ بِئْسَ الْأَلْمَمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan*

⁷² Q.S. An-Nur : 61

⁷³ Q.S. Al-Fath : 7

jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim”. (QS. Al-Hujurat: 11).⁷⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa adanya nilai kesetaraan, keadilan dan tidak bersikap diskriminasi terhadap siapapun. Nilai-nilai tersebut membentuk sikap manusia untuk menghormati dan menghargai sesama manusia sebagai nilai universal yang dikandung semua budaya-agama di dunia. Kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Tingkatan atau kedudukan yang sama tersebut bersumber dari pandangan bahwa semua manusia tanpa dibedakan adalah diciptakan dengan kedudukan yang sama, yaitu sebagai makhluk mulia dan tinggi derajatnya dibandingkan makhluk lain. Sesiapa yang mengerjakan amal shaleh dan beriman baik laki-laki maupun perempuan, penyandang disabilitas maupun individu yang normal akan mendapat pahala yang sama tanpa melihat dari segi apapun. Perbedaan antara manusia yang satu dengan yang lain ialah iman dan takwanya yaitu mereka yang mendapat kedudukan yang mulia disisi Allah.⁷⁵ Sebagaimana Sabda Nabi sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى أَعْمَالِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ (رواه مسلم وابن ماجة).

⁷⁴ Q.S. Al-Hujurat : 11

⁷⁵ Syamsul Bahri, *Pendidikan Multikultural Perspektif Al-Quran: Tafsir Surat AlHujurat 11-13 dengan Pendekatan Hermeneutik*, (Banda Aceh: LSAMA, 2017), 58.

“Dari Abu Hurairah ra. dan ia meriwayatkannya sampai kepada Nabi Saw. beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk rupa kalian dan harta-harta kalian, tetapi Dia hanya memandang kepada amal perbuatan dan hati kalian.”(HR. Muslim dan Ibnu Majah)⁷⁶

Islam memandang netral terhadap penyandang disabilitas yaitu memandang sama antara penyandang disabilitas dan manusia lainnya. Islam lebih menekankan pentingnya amal shaleh atau perbuatan-perbuatan baik dari pada melihat kesempurnaan fisik, kekayaan dan sebagainya. Kedudukan manusia sama di mata Allah, maka dari itu hendaknya manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya tidak perlu menyombongkan diri dengan apa yang dia punya karena itu semua adalah titipan dan dalam seketika Allah dapat mengambil kenikmatan tersebut. Maka hendaknya mempergunakan dan menjalankan apa yang diamanahkan oleh Allah dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan hukum di Indonesia, dan hukum Islam. Sependapat dengan Undang-undang No. 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bahwa hukum tersebut dibuat dan dibentuk memiliki ketentuan yang sama yaitu menunjung tinggi sikap toleransi terhadap sesama terutama terhadap penyandang disabilitas, mendapat perlakuan yang sama, tidak adanya sikap diskriminasi serta adanya perlakuan khusus terhadap penyandang disabilitas. Adapun keseluruhan dari ayat-ayat tentang penyandang disabilitas yang lainnya menunjukkan penyandang disabilitas secara psikis (batin) diantaranya seperti perumpamaan terhadap orang yang menyekutukan risalah Allah, balasan/ganjaran terhadap orang yang tidak mengambil nikmat dari panca indra pertanggung jawaban terhadap apa yang dilakukan sewaktu masih hidup.

Sependapat dengan Cece Abdulwaly dalam bukunya Bela Al-Quran Agar Al-Quran membela kita yang menjelaskan

⁷⁶ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 3, terj. Iqbal dan Mukhlis BM, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 542.

tentang pokok-pokok kandungan Al-Quran yaitu Al-Quran ayat-ayat Al-Quran tersebut didalamnya menjelaskan tentang perintah, sejarah atau kisah-kisah orang terdahulu, hukum-hukum dan sebagainya guna untuk memberi informasi kepada ummat manusia agar dapat memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran menekankan ketakwaan yang menjadi tolak ukur kemuliaan seseorang, bukan melihat dari kesempurnaan fisik, kedudukan atau tingkatan sosial, kekayaan, warna kulit, ras, dan lain-lain. Kesetaraan dalam Islam melihat dari ketakwaan atau keimanan seseorang. Penyandang disabilitas merupakan bagian dari umat muslim, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama sesama muslim.

G. Demokrasi Dalam Islam

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi adalah prinsip dasar tata kehidupan bermasyarakat, baik dalam interaksi sesama komponen masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintahan atau negara. Dalam rangka mewujudkan masyarakat sipil atau masyarakat madani, demokrasi adalah prasyarat mutlak. Secara etimologis kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratos* yang berarti pemerintahan. Sedangkan secara maknawi kata demokrasi telah mengalami berbagai penafsiran bahkan perubahan makna hingga jauh dari pengertian awalnya. Istilah demokrasi, sebagaimana halnya istilah sosial-politik lainnya, tidak memiliki definisi yang tetap, karena demokrasi merupakan entitas dinamis yang memiliki berbagai macam pengertian sepanjang waktu.⁷⁷ Unsur-unsur dasar dari demokrasi dipengaruhi dan dibentuk oleh konstruksi sosiologis dan budaya masyarakat setempat. Dengan demikian

⁷⁷ Georg Sorensen, *Demokrasi and Democratization: Processed and Prospects in a Changing Word*, Trj. I. Made Krisna, *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek Dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), 15.

tingkat dan kualitas demokrasi di suatu negara berbeda dengan praktek dan konsep demokrasi di negara lainnya.

Secara terminologi para ahli memiliki beberapa pengertian diantaranya: Joseph A. Schumeter mengatakan bahwa, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusi untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Sedangkan Sidney Hook berpendapat bahwa Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung dan tidak langsung didasarkan kepada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.⁷⁸ Dan Hendri B. Mayo juga menyatakan demokrasi adalah sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum di tentukan atas dasar mayoritas rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang berdasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.⁷⁹

Ada banyak definisi tentang demokrasi, namun menurut Rahman Yasin, penulis buku *Gagasan Islam tentang Demokrasi*, yang paling populer untuk saat ini adalah apa yang telah dirumuskan oleh Abraham Lincoln (1863), presiden Amerika Serikat yang ke-16. Menurut Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Intinya demokrasi adalah suatu tata pemerintahan di mana rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung berkuasa dan berdaulat penuh.⁸⁰

⁷⁸A. Ubaidillah, et al, *Pendidikan Kewarganegaraan (civil education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), 39.

⁷⁹ Moh. Mahfud.MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2003), 19.

⁸⁰ Rahman Yasin, *Gagasan Islam Tentang Demokrasi*, (Yogyakarta : AK Group, 2006), 95.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat demokrasi adalah rakyat sebagai peran utamanya dalam proses sosial dan politik, dengan kata lain pemerintahan berada di tangan rakyat yang mengandung pengertian tiga hal : pemerintah dari rakyat (*government of the people*); dan pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*); dan pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*) yang ketiganya dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan oleh mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi . pengakuan dan dukungan rakyat bagi suatu pemerintahan sangatlah penting, karena dengan legitimasi politik tersebut pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya.

Kedua, pemerintahan oleh rakyat memiliki pengertian bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi elite negara atau elite birokrasi. Selain pengertian ini, unsure kedua ini mengandung pengertian bahwa bahwa dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah berada dalam pengawasan rakyat (*social control*). Pengawasan dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui para wakilnya di parlemen. Dengan adanya pengawasan para wakil rakyat di parlemen ambisi otoritarianisme dari para penyelenggara dapat dihindari.

Ketiga, pemerintah untuk rakyat mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintahan harus dijadikan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat umum harus dijadikan sebagai landasan utama kebijakan sebuah pemerintahan yang demokratis.⁸¹

⁸¹ A. Ubaidillah, et al, *Pendikan...*, 45.

Jadi suatu sistem menganut paham Demokrasi apabila para pemimpin atau wakil rakyat dipilih langsung oleh rakyat dewasa melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Yang mana dalam pelaksanaannya para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan semua penduduk yang telah memiliki hak pilih berhak memberikan suaranya dan dijamin oleh negara melalui undang-undang yang dijalankan secara adil.⁸²

2. Unsur-unsur Demokrasi

Unsur penting demokrasi yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan demokrasi adalah pemilihan umum dan partai politik,

- a. Pemilihan umum, pemilu merupakan mekanisme demokrasi untuk memutuskan pergantian pemerintah dimana rakyat dapat menyalurkan aspirasi politiknya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pemilu harus dilaksanakan secara teratur serta kompetisi yang terbuka dan sederhana diantara partai-partai politik.
- b. Partai politik, selain sebagai struktur kelembagaan politik yang anggotanya bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan dan kedudukan politik, partai politik adalah sebuah wadah bagi penampungan aspirasi rakyat, peran tersebut merupakan implemementasi nilai-nilai demokrasi, yaitu keterlibatan masyarakat untuk melakukan control terhadap penyelenggaraan negara, melalui partai politik itulah segala aspirasi rakyat yang beragam dapat disalurkan secara teratur.

3. Dasar-Dasar Demokrasi

Tegaknya demokrasi sebagai sebuah tatanan kehidupan kenegaraan, pemerintahan, ekonomi, social, dan politik sangat bergantung kepada keberadaan dan peran yang dijalankan

⁸² Budi Suryadi, *Sosiologi Politik: Sejarah, Konsep, dan Perkembangan Konsep*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2007), 102.

oleh unsur-unsur penopang tegaknya demokrasi itu sendiri, diantaranya berikut ini merupakan nilai-nilai demokrasi yang dikemukakan oleh Henry B. Mayo antara lain:⁸³

- a. Menyelesaikan masalah dengan damai dan melembaga serta pengguna paksaan sedikit mungkin. Demokrasi, dalam hal ini adalah satu-satunya sistem yang mengakui adanya ekspresi politis dari pertikaian-pertikaian soal kepentingan dan pendapat, tetapi mengatur penyelesaiannya secara damai (kompromi) yang melembaga melalui perundingan politik, sebagai alternatif dari penyelesaian berdasarkan kekerasan atau dekrit seperti dalam sistem diktator.
- b. Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah. Karena itu, proses teknologisasi dan industrialisasi dunia modern, berdasarkan nilai demokrasi, tidak dibenarkan dilakukan lewat “operasi darurat” atau cara-cara yang dipaksakan, despotis, dan dikerahkan dari pusat secara ketat karena ketidaksabaran, seperti yang terjadi pada kebanyakan negara-negara berkembang.
- c. Pergantian penguasa dengan teratur dan damai lewat pemilu yang jujur dan kompetitif.
- d. Nilai keanekaragaman. Demokrasi dalam hal ini melihat keanekaragaman bukan saja sebagai sesuatu yang ada dan sah, tetapi sebagai sesuatu yang baik sebagaimana kebebasan. Untuk itu diperlukan masyarakat yang
- e. Terbuka yang berpandangan bahwa tidak ada satu nilai pun yang dapat benar-benar ditarik sampai pada batas yang mutlak. Dalam masyarakat demikian, karena posisinya sama, kesempatan untuk prakarsa dan pengembangan bakat paling tidak kondisi yang memungkinkan diberikan.

⁸³ Henry. B. Mayo, “Nilai-nilai Demokrasi”, dalam Miriam Budiardjo (Ed.), *Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: Gramedia, 1975), 159-196.

f. Menegakkan keadilan sebagai inti moralitas politik. Demokrasi merupakan sistem terbaik untuk menegakkan keadilan. Hal ini karena penindasan kebebasan tidak diperkenankannya. Demokrasi memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mengajukan wakilnya dan cara-cara damai yang ditawarkannya dalam penyelesaian pertikaian politik akan melahirkan keadilan relatif. Partisipasi rakyat berarti memperluas jumlah orang yang akan diliputi keadilan dan karena kontrol rakyat sebagai esensi demokrasi kemudian akan mendatangkan pemerintahan yang bertanggungjawab.

Tetapi demokrasi lebih dari pada itu, demokrasi adalah paket kenegaraan yang beradab, yang sesuai dengan otonomi dan kesamaan hak seluruh masyarakat. Disamping faham kesamaan dan kedaulatan rakyat pengertian demokrasi dalam arti modern: negara konstitusional (negara menjalankan kekuasaannya, terutama yang legislatif, atas dasar dan dalam batas sebuah undang-undang dasar), pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia (yang sering dimasukkan dalam undang-undang dasar), toleransi religius, perlindungan terhadap hak-hak dasar, identitas sosial dan kultur ras minoritas, negara hukum (negara menjalankan kekuasaan eksekutif dalam batas-batas hukum yang berlaku; kebebasan proses yudikatif dari campur tangan eksekutif), serta pembagian kekuasaan.⁸⁴

4. Demokrasi Dalam Pandangan Islam

Di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin telah lama muncul sistem kehidupan yang bernama demokrasi dan telah diadopsi oleh hampir seluruh negeri-negeri Islam dan masyarakatnya. Sebagian menerimanya secara total tanpa reserve, sebagian mencoba mengkompromikannya dengan Syariat Islam, dan sebagian kecil lagi menolaknya mentah-

⁸⁴ Franz Magnis Suseno, dkk, *Agama dan Demokrasi*, (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1992), 8.

mentah dan hanya menginginkan Syariat Islam saja yang diterapkan sebagai sistem kehidupannya.

Respon umat Islam terhadap demokrasi tidak lepas dari cara pandang (*episteme*) umat Islam terhadap kedudukan Nabi Muhammad Saw. dalam aktivitas politik sebagai diperdebatkan para pemikir Muslim sejak Islam bersinggungan (dan merasa ketinggalan dari) dengan Barat. Secara umum, cara pandang umat Islam terhadap Islam dan respon mereka terhadap demokrasi dapat dikelompokkan menjadi tiga⁸⁵ :

- a. *Pertama*, sebagian pemikir Muslim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. adalah agama yang sempurna, lengkap, mengurus semua aspek kehidupan: ritual, sosial, ekonomi dan politik. Bagi yang berpendapat demikian, Islam bukanlah agama (sebagai dipahami Barat) yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi Islam adalah agama yang lengkap yang didalamnya terhadap sistem kenegaraan, orang Islam tidak perlu “meniru demokrasi” dan ketatanegaraan Eropa. Rujukan pemikiran politik Islam adalah sistem kenegaraan yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Saw. dan al-Khulafa’ al-Rasyidun. Diantara pemikir yang berpendapat demikian adalah Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, Rasyid Ridha. Demokrasi menurut kelompok ini adalah sesuatu yang harus ditolak, karena merupakan sesuatu yang impossible, dan ancaman yang perlu diwaspadai. Beberapa ahli dan ulama yang berpandangan demikian antara lain, Syaikh Fadhallah Nuri dan Thabathabai dari Iran, Sayyid Quthb dan al-Sya’rawi dari Mesir, serta Ali Benhadj dari Aljazair. Mereka berpendapat bahwa dalam Islam tidak ada tempat yang

⁸⁵ Jaih Mubarak, *Fiqh Siyasaah, Studi Tentang Ijtihad dan Fatwa Politik di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 50.

layak bagi demokrasi, yang karenanya Islam dan demokrasi tidak bisa dipadukan.

- b. *Kedua*, sebagian pemikir Muslim berpendapat bahwa tugas Nabi Muhammad Saw, hanyalah sebagai pembawa risalah keagamaan, yang bertugas mengajak manusia agar berjalan di atas kebenaran dan budi pekerti yang luhur; meskipun demikian, mereka berkeyakinan bahwa Islam menghendaki terwujudnya keserasiaan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi.⁸⁶ Mereka berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad Saw, bukanlah pemimpin politik tetapi hanya sebagai pemimpin agama. Diantara pemikir yang berpendapat demikian adalah Ali Abd al-Razik dan Thaha Husen. Ali Abd al-Raziq dalam bukunya *al-Islam wa Ushul al-Hukum: Bahts fi al-Khilafat wa al-Hukumat*, ia menolak kedudukan Nabi Muhammad Saw, sebagai kepala negara, Ali-Abdul al-Raziq membuat pertanyaan sebagai berikut: apakah Nabi Muhammad Saw. Itu sebagai pemegang kekuasaan politik dan kepala pemerintahan yang sekaligus juga seorang rosul yang membawa risalah keagamaan atau bukan. Kelompok kedua ini menyetujui adanya prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam tetapi di lain pihak mengakui adanya perbedaan di antara keduanya, berangkat dari doktrin kedaulatan Tuhan dalam bentuk syari'ah (hukum Tuhan) yang membatasi kedaulatan rakyat. Al-Maududi sebagai salah satu pelopornya menyatakan bahwa ada kemiripan wawasan yang hampir sama, seperti konsep-konsep yang ada di Dalam Islam sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Keadilan yang diterangkan dalam surat Asy-Syura ayat ke 15 :

فَلِذَلِكَ فَادَّعِ وَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلْتُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ١٥

⁸⁶ *Ibid.*, 53.

“Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan Katakanlah: "Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya Berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan Kami dan Tuhan kamu. Bagi Kami amal-amal Kami dan bagi kamu amal-amal kamu. tidak ada pertengkaran antara Kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepadaNya lah kembali (kita)" (Q.S Asy-Syura : 15)⁸⁷

- 2) Persamaan dalam Al-qur'an surat Al-Hujarat ayat ke 13

يَتَّيْنَاهُمَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ

عَلِيمٌ حَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : *“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. Al-Hujarat : 13)⁸⁸*

- 3) Akuntabilitas pemerintahan diterangkan dalam Al-qu'ran surat An-Nisaa' ayat 58.

﴿٥٨﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

⁸⁷ Q.S Asy-Syura : 15

⁸⁸ Q.S. Al-Hujarat : 13

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”. (Q.S. An-Nisaa’ : 58)⁸⁹

- 4) Musyawarah diterangkan dalam surat Asy-Syura ayat 38

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٣٨﴾

“*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka*”. (Q.S. Asy-Syura : 38)⁹⁰

- 5) Tujuan negara yang diterangkan dalam Al-qu’ran surat Al-Hajj ayat ke 4

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ﴿٤﴾

“*Yang telah ditetapkan terhadap syaitan itu, bahwa Barangsiapa yang berkawan dengan Dia, tentu Dia akan menyesatkannya, dan membawanya ke azab neraka*”. (Q.S. Al-Hajj : 4)⁹¹

⁸⁹ Q.S. An-Nisaa’ : 58

⁹⁰ Q.S. Asy-Syura : 38

⁹¹ Q.S. Al-Hajj : 4

- 6) Hak-hak oposisi diterangkan dalam surat Al- Ahzab ayat ke 70

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٧٠

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”. (Q.S. Al-Ahzab : 70)⁹²

Tetapi perbedaanya terletak pada kenyataan bahwa kalau dalam sistem Barat, suatu negara demokratis menikmati hak-hak kedaulatan mutlak, maka dalam demokrasi Islam, kekhalifahan di tetapkan untuk dibatasi oleh batasbatas yang telah di gariskan hukum *illahi*. Rasyid Al-Ghanoushi dan Abdul Fattah Morou, kedua tokoh Gerakan Kecenderungan Islam (*Movement de Tendence Islamique/ MTI*), mereka mengkombinasikan ajaran Islam dengan demokrasi. Bagi Ganaoshi, demokrasi , kedaulatan rakyat, dan peran negara (“negara bukan berasal dari Tuhan melainkan dari rakyat, negara harus melayani kepentingan kaum Muslim”), pemilihan umum, multi partai, dan undang-undang adalah bagian pemikiran baru Islam yang akar dan legitimasinya di dapatkan dari interpretasi atau reinterpretasi yang segar dari sumber-sumber Islam. Sedangkan bagi Morou, “hukum berasal dari Tuhan tetapi kedaulatan adalah dari rakyat”. Ia membedakan antara prinsip-prinsip umum Al-Qur’an yang mampu bertahan dan legislasi manusia dalam batasan prinsip-prinsip tersebut yang menjadi tanggung jawab rakyat.

- c. *Ketiga*, kelompok yang mencoba mencari jalan tengah (sintesis) antara dua kubu pemikiran sebelumnya. Mereka menolak pendapat pertama yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang lengkap yang telah mengatur segala hal. Juga mereka menolak pendapat yang kedua mengenai

⁹² Q.S. Al-Ahzab : 70

peran Nabi Muhammad SAW, yang hanya memiliki tugas risalah (tanpa tugas politik). Menurut Muh. Zuhri, diantara pemikir Muslim yang moderat ini adalah Muhammad Husin Haikal dan Fazlur Rahman. Muslim yang memiliki pandangan sintesis mengenai agama, memiliki sikap akomodatif-kritis terhadap demokrasi yang berasal dari dan dipraktekkan di Barat. Menurut Huwaydi, salah satu tokoh yang melakukan sintesa yang viable antara Islam dan demokrasi yang yaris sempurna. Bagi dia, esensi demokrasi adalah pemilu yang jujur, adil, dan kompetitif, serta akuntabilitas penguasa karena jika tidak akan diturunkan dari jabatannya, dengan kelembagaan seperti penerapan metode mayoritas, multi partai, penghormatan hak-hak minoritas, kebebasan oposisi dan pres, independensi kehakiman, dan lain-lain. Beberapa alasan yang dikemukakannya, yaitu:

- 1) *Pertama*, beberapa Hadits menunjukkan bahwa Islam menghendaki pemerintahan yang disetujui rakyatnya⁹³.

Dalam Hadits Riwayat Ibnu Majah disebutkan:

عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولوا : ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة : من تقدم قوما وهم له كارهون ، ورجل أتى الصلاة دبارا - والدبار ان يأتيها بعد ان تقوته - ورجل اعتبد محزّره . روه ابو داود وابن حاجر .

“Dari Abdulloh bin Amr, bahwa Rosululloh saw pernah berkata “Ada tiga golongan yang allah tidak bakal menerima shalat mereka, yaitu: orang yang mengimami suatu kaum, sedangkan kaum itu tidak menyukainya, orang yang mendatangi shalat dengan

⁹³ Fahmi Huwaidi, *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani*, Terj. M. Abd. Ghofar dalam *Al-Islam wa Al-Dimuqratiyah*, (Bandung: Mizan, 1996), 193-198.

terlambat yaitu, ia mendatangi shalat sesudah habis waktunya dan orang yang memperhamba budak yang sudah dimserdekakan".(HR. Ibnu Majah)⁹⁴

- 2) *Kedua*, penolakan Islam terhadap kediktatoran. Banyak ayat Al-Qur'an yang menunjukkan hal itu. Diantaranya dalam QS. Al-Baqarah: 258 yaitu:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ۖ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan). ketika Ibrahim mengatakan: "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan," orang itu berkata: "Saya dapat menghidupkan dan mematikan". Ibrahim berkata: "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, Maka terbitkanlah Dia dari barat," lalu terdiamlah orang kafir itu; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim". (Q.S. Al-Baqarah : 258)⁹⁵

- 3) *Ketiga*, dalam Islam, pemilu merupakan kesaksian rakyat dewasa bagi kelayakan seorang kandidat dan mereka tentu saja, seperti yang diperintahkan al-Qur'an,

⁹⁴ Imam Muhamad Asy Syaekani, *Nailul Autar Syarh Muntaqa Al-Akhbar min Ahadits Sayyid Al-Akhyar*, Trj. Hadi Mulyo, Katur Suhardi, "Terjemah Nailul Autar", (Semarang : Asy Syifa, 1994), 408.

⁹⁵ Q.S. Al-Baqarah : 258

mesti tidak menyembunyikan persaksiannya, mesti bersikap adil dan jujur serta tidak menjadi saksi-saksi palsu. Jika tidak, mereka akan diperintah oleh seorang yang tidak memiliki kompetensi. Dan, jika pemilu sebagai lembaga kontrol rakyat terhadap penguasa, dimana kelembagaan itu berfungsi sebagai mekanisme untuk menurunkan penguasa yang tidak kredibel dan tidak bertanggungjawab.

- 4) *Keempat*, demokrasi merupakan sebuah upaya mengembalikan sistem kekhalifahan Khulafa'urraSyidin yang memberikan hak kebebasan kepada rakyat yang hilang ketika beralihnya sistem kekuasaan Islam kepada sistem kerajaan di tangan Mu'awiyah, pendiri Umayyah, sesuatu yang pertama menimpa kaum muslimin dalam sejarah.
- 5) *Kelima*, negara Islam adalah negara keadilan dan persamaan manusia di depan hukum. Ada banyak cerita yang memperlihatkan hal itu.
- 6) *Keenam*, seperti dirumuskan oleh teoritis-teoritis politik Islam. Semisal al-Mawardi, imamah (kepemimpinan politik) adalah kontrak sosial yang riil, yang karenanya, kata Ibn Hazm, jika seorang penguasa tidak mau menerima teguran boleh diturunkan dari kekuasaannya dan diganti dengan yang lain.⁹⁶

⁹⁶ Jaih Mubarak, *Fiqh Siyasah, Studi Tentang Ijtihad dan Fatwa Politik di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 50.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- A. Ubaidillah, et al, *Pendidikan Kewarganegaraan (civil education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000
- A.S.S Tambunan, *Pemilu di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR,DPR, dan DPRD*, Bandung : Binacipta, 2010
- Agusman Damos Dumoli, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010
- Ahmad Syafii Maarif, *Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia, dalam Aspirasi Umat Islam Indonesia*, Jakarta: Leppenas, 1983
- Amiruddin dan A. Zaini Bisri, *Pilkada Langsung : Problem dan Prospek*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2005
- Andriani Putri, *Klasifikasi Gangguan Jiwa*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2005
- Anifatul Kiftiyah, “*Analisis Fikih Al-Siyāsah Al-Dustūriyyah Terhadap Golput (Golongan Putih) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Yang Demokratis*”, skripsi program sarjana Universitas Islam Sunan Ampel, Surabaya 2019
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: CV. Mandar maju, 2017

- Bayu Dwi A, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta : Konstitusi Press, 2014
- Budi Suryadi, *Sosiologi Politik: Sejarah, Konsep, dan Perkembangan Konsep*, Jogjakarta: IRCiSoD, 2007
- Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Methodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997
- Deddy Mulyana, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Permata Rosadakarya, 2010
- EkoRiyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia (Perspektif Internasional, Regional, Dan Nasional)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018
- Fahmi Huwaidi, *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani, Terj. M. Abd. Ghofar dalam Al-Islam wa Al-Dimuqratiyah*, Bandung: Mizan, 1996
- Franz Magnis Suseno, dkk, *Agama dan Demokrasi*, Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1992
- Georg Sorensen, *Demokrasi and Demokratization: Processed and Prospects in a Changing Word, Trj. I. Made Krisna, Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek Dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah) , Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003*
- Henry. B. Mayo, “*Nilai-nilai Demokrasi*”, dalam Miriam Budiardjo (Ed.), *Masalah Kenegaraan*, Jakarta: Gramedia, 1975

- Herimanto dan Winamo, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014
- Imam Muhamad Asy Syaukani, *Nailul Autar Syarh Muntaqa Al-Akhbar min Ahadits Sayyid Al-Akhyar*, Trj. Hadi Mulyo, Katur Suhardi, “*Terjemah Nailul Autar* “, Semarang : Asy Syifa, 1994
- Jaih Mubarak, *Fiqh Siyasah, Studi Tentang Ijtihad dan Fatwa Politik di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005
- Jaih Mubarak, *Fiqh Siyasah, Studi Tentang Ijtihad dan Fatwa Politik di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005
- Jati Rinakri Atmaja, *Pendidikan dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017
- Jenedjri M. Gaffar, “*Demokrasi Konstitusional (Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945)*”, Jakarta: Konstitusi Press, 2012
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995
- M masan dan Rachmat, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: PT. Grasindo, 2011.
- Masdar Farid Mas’udi, *Syarah Konstitusi Uud 1945 Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011
- Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara, Cetakan ke-2*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 1988

- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Pusat Studi Ilmu Hukum UI, 2002
- Moh. Mahfud.MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Rhineka Cipta , 2003
- Muchtar Pakpahan, *Ilmu Negara dan Politik*, Jakarta: Bumi Intitarma Sejahtera, 2006
- Muhammad Asfar, *Pemilihan Umum dan Perilaku memilih 1955-2004*, Surabaya : Pustaka Eurika, 2006
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 3, terj. Iqbal dan Mukhlis BM, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2013
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2013
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2006
- Nurhidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia*, Yogyakarta : Fajar Media Press, 2011
- Peter mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011
- Rahman Yasin, *Gagasan Islam Tentang Demokrasi*, Yogyakarta : AK Group, 2006

- Setiati widihastuti dan Fajar Rahayuningsih, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: PT Pustaka Insan Mandiri, 2008.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1987
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2012
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986
- Subektidan Tjirosoedibjo, “Conditio Sine Causa”, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnja Paramita, 1969
- Syamsul Bahri, *Pendidikan Multikultural Perspektif Al-Quran: Tafsir Surat Al-Hujurat 11-13 dengan Pendekatan Hermeneutik*, Banda Aceh: LSAMA, 2017
- Tim Redaksi BIP, Undang-Undang Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang NO 7 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018.
- Titi Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam WaDillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2007
- Wahyu Amri Purba, “*Hak Memilih Bagi Orang Yang Terganggu Jiwa/ Ingatan Dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Analisis Fiqih Siyasah)*”, Skripsi Program Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan 2019

Widianingsih, “Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia”, *Jurnal Signal*, Vol. 5, No. 2, Januari 2017

Jurnal

Abdul Bari Azed, “Pelaksanaan Asas-Asas Pemilihan Umum Oalam Undang-Undang Pemilihan Umum”, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol.31, No. 2, April 2005

Ahmad Zazili, “Pengakuan Negara Terhadap Hak-Hak Politik (Right To Vote) Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 1, Maret 2012

Alexsander Yandra, “Penyelamatan Hak Pilih Warga Perbatasan Jelang Pilkada”, *Jurnal Kajian Politik*, Vol. 13, No. 1, Januari 2017

Didik Sukriono, “Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 1, Juli 2009

Hartuti Purnaweni, “Demokrasi Indonesia dari Masa ke Masa”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3, No.2, Maret 2004

Maria Desti Rita, “Peranan Kpu Dalam Sosialisasi Pemilukada Kepada Penyandang Disabilitas Di Kota Bandar Lampung”, *Jurnal Kultur Demokrasi*, Vol. 5, No. 1, Juni 2006

Masykuri Abdillah, “Epistimologi Fikih Siyasa”. *Jurnal Ahkam*, Vol. 12, No. 1 Januari 2012

Pan Mohamad Faiz, “Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 3, September 2018

Syamsarina, “Eksistensi Hukum Wadh’i Dalam Syari’at”, *Jurnal Al-Qishthu* Vol. 14, No. 1, Januari 2016

Topo Santoso, “Proses Pemilu Di Indonesia”, *Jurnal Heinonline*, Vol. 1, No. 4, Juli 2004

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

SumberOn-line

Pengertian hak pilih (On-line) tersediadi
: <https://kbbi.kata.web.id/?s=hak> (10 Mei 2020)

Pengertian mahkamah konstitusi (On-line) tersedia di :
<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2020/03/mahkamah-konstitusi.html> (10 Mei 2020)